



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආයතන විභාගනු ලබන පළාත් මට්ටමේ පාලන කාර්ය මණ්ඩලය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 5);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 18);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 27);



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- 28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43);
- 29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 37).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1. Pendapatan-LRA
 - 3.1.2. Belanja
 - 3.1.3. Aset
 - 3.1.4. Kewajiban
 - 3.1.5. Ekuitas
 - 3.1.6. Pendapatan-LO
 - 3.1.7. Beban
 - 3.1.8. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab V. Penutup



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘතිමයව පාලනය කළ යුතු පාඩමක් සහිතව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan BPKA

URAIAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	REALISASI	%	SISA
BELANJA DAERAH	1.031.569.863.711,00	957.061.416.169,34	92,77	74.508.447.541,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	90.090.056.989,00	79.527.864.624,00	88,28	10.562.192.365,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.620.000,00	2.620.000,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.450.500,00	3.302.400,00	95,71	148.100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.568.000,00	1.514.000,00	96,56	54.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	74.051.251.816,00	64.216.860.816,00	86,72	9.834.391.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.020.000,00	67.619.390,00	99,41	400.610,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800,00	4.619.900,00	92,40	379.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.999.700,00	2.999.700,00	100,00	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	73.920.000,00	73.452.509,00	99,37	467.491,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.483.000,00	5.007.000,00	91,32	476.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.808.400,00	76.555.097,00	91,35	7.253.303,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	232.257.000,00	217.813.902,00	93,78	14.443.098,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.826.600,00	63.645.465,00	98,18	1.181.135,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.756.000,00	3.750.000,00	99,84	6.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.431.000,00	35.920.000,00	98,60	511.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.920.350,00	80.330.550,00	94,60	4.589.800,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.176.000,00	16.764.000,00	87,42	2.412.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.589.000,00	209.409.499,00	94,08	13.179.501,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	172.746.000,00	157.203.600,00	91,00	15.542.400,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	516.439.860,00	495.069.155,00	95,86	21.370.705,00
Belanja Modal Mesin Proses	4.620.000,00	4.619.200,00	99,98	800,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	14.205.000,00	14.169.260,00	99,75	35.740,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	4.360.000,00	2.398.400,00	55,01	1.961.600,00
Belanja Modal Personal Computer	314.090.000,00	310.150.047,00	98,75	3.939.953,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	159.540.000,00	144.139.248,00	90,35	15.400.752,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.124.860,00	15.096.000,00	99,81	28.860,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.803.663,00	144.863.000,00	99,35	940.663,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	145.803.663,00	144.863.000,00	99,35	940.663,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.100.000,00	14.900.000,00	98,68	200.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	15.100.000,00	14.900.000,00	98,68	200.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.729.000,00	17.897.440,00	90,72	1.831.560,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.190.557.100,00	3.670.412.497,00	87,59	520.144.603,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආයතන විභාගනායක සේවයේ පාලන කොටස

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	REALISASI	%	SISA
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	383.207.000,00	374.279.614,00	97,67	8.927.386,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.912.000,00	5.963.119.146,00	99,37	37.792.854,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.726.000,00	11.917.000,00	63,64	6.809.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.002.807.200,00	964.778.192,00	96,21	38.029.008,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.302.439.000,00	1.294.994.200,00	99,43	7.444.800,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	672.072.000,00	652.623.112,00	97,11	19.448.888,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	691.197.000,00	687.373.440,00	99,45	3.823.560,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	932.373.835.072,00	869.234.714.095,34	93,23	63.139.120.976,66
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	34.456.000,00	24.909.720,00	72,29	9.546.280,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	29.716.000,00	26.155.064,00	88,02	3.560.936,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	280.766.000,00	248.863.512,00	88,64	31.902.488,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	581.178.500,00	513.104.309,00	88,29	68.074.191,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	80.703.000,00	54.051.531,00	66,98	26.651.469,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	84.975.000,00	9.625.000,00	11,33	75.350.000,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.865.000,00	97,30	135.000,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1.823.300,00	1.823.300,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	15.990.000,00	15.876.389,00	99,29	113.611,00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	54.664.000,00	50.218.617,00	91,87	4.445.383,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආකෘතිමයව පාලනය කළ හැකි වශයෙන් සකස් කළ ලේඛන

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	REALISASI	%	SISA
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	7.972.600,00	7.801.800,00	97,86	170.800,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17.326.100,00	17.071.375,00	98,53	254.725,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	50.432.000,00	35.865.281,00	71,12	14.566.719,00
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.524.600,00	2.999.600,00	85,10	525.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3.489.000,00	2.789.000,00	79,94	700.000,00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.743.300,00	2.293.300,00	83,60	450.000,00
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	8.974.900,00	8.974.774,00	100,00	126,00
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	111.450.000,00	111.272.310,00	99,84	177.690,00
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1.124.143.000,00	916.845.250,00	81,56	207.297.750,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	342.421.123.032,00	322.491.800.904,34	94,18	19.929.322.127,66
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	197.905.896.382,00	180.781.170.273,84	91,35	17.124.726.108,16
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	141.515.226.650,00	138.710.630.630,50	98,02	2.804.596.019,50
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	39.476.792.633,00	3.405.377.000,00	8,63	36.071.415.633,00
Belanja Tidak Terduga	39.476.792.633,00	3.405.377.000,00	8,63	36.071.415.633,00
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	547.966.592.107,00	541.272.131.059,00	98,78	6.694.461.048,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	465.270.147.223,00	459.498.612.174,00	98,76	5.771.535.049,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	82.696.444.884,00	81.773.518.885,00	98,88	922.925.999,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.709.701.900,00	3.382.299.400,00	91,17	327.402.500,00
Penyusunan Standar Harga	317.064.000,00	310.285.000,00	97,86	6.779.000,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	82.221.600,00	82.094.600,00	99,85	127.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	239.897.000,00	164.544.950,00	68,59	75.352.050,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	2.386.066.800,00	2.161.430.836,00	90,59	224.635.964,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	33.000.000,00	32.910.000,00	99,73	90.000,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	200.000.000,00	195.527.500,00	97,76	4.472.500,00
Penilaian Barang Milik Daerah	205.879.500,00	204.050.900,00	99,11	1.828.600,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	478.573.000,00	459.893.114,00	96,10	18.679.886,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.396.269.750,00	4.916.538.050,00	91,11	479.731.700,00
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2.708.364.400,00	2.554.412.371,00	94,32	153.952.029,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	37.900.000,00	37.795.500,00	99,72	104.500,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	19.467.100,00	19.075.550,00	97,99	391.550,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආයතන විභාගනායක කමිටුව පාලන කොමසාරිස්වරුන්

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	REALISASI	%	SISA
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	157.402.000,00	153.825.200,00	97,73	3.576.800,00
Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	151.937.950,00	139.227.135,00	91,63	12.710.815,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.299.768.300,00	1.991.642.794,00	86,60	308.125.506,00
Belanja Modal Personal Computer	11.200.000,00	10.811.400,00	96,53	388.600,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	37.900.000,00	37.800.000,00	99,74	100.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32.710.000,00	31.735.000,00	97,02	975.000,00
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	26.620.000,00	26.620.000,00	100,00	-

2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pendapatan Daerah BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 4.746.373.274.671,00 dan direalisasikan sebesar Rp 4.769.759.835.427,20 atau 100,49%. Belanja Daerah BPKA dianggarkan sebesar Rp 1.031.569.863.711,00 dan direalisasikan sebesar Rp 957.061.416.169,34 atau 92,77%.

Secara umum target pendapatan dan kinerja dapat dicapai dengan baik dan tidak ada kendala yang material dihadapi oleh BPKA.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦁꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦠ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BPKA

3.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan BPKA

	2025	2024 (<i>audited</i>)
3.1.1. <u>Pendapatan Daerah</u>	<u>Rp 4.769.759.835.427,20</u>	<u>Rp 5.930.987.939.720,85</u>

Pendapatan Daerah BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 4.746.373.274.671,00 dan direalisasikan sebesar Rp 4.769.759.835.427,20 atau 100,49% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 1.161.228.104.293,65) atau (19,58%) dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.930.987.939.720,85 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1. <u>Pendapatan Asli Daerah</u>	<u>Rp 1.740.156.874.266,20</u>	<u>Rp 2.387.424.334.018,85</u>
---	---------------------------------------	---------------------------------------

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.704.380.170.749,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.740.156.874.266,20 atau 102,10% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 647.267.459.752,65) atau (27,11%) dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.387.424.334.018,85 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1.1. <u>Pajak Daerah</u>	<u>Rp 1.541.673.476.325,25</u>	<u>Rp 2.157.532.293.945,00</u>
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.521.266.024.486,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.541.673.476.325,25 atau 101,34% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 615.858.817.619,75) atau (28,54%) dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.157.532.293.945,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PAJAK DAERAH				
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	653.605.528.300,00	666.057.670.000,00	101,91	1.041.662.985.900,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	183.794.999.400,00	201.880.407.600,00	109,84	453.957.069.400,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	377.603.830.093,00	377.603.830.093,00	100,00	372.113.724.291,00
Pajak Air Permukaan	887.041.634,00	922.269.636,00	103,97	806.104.996,00
Pajak Rokok	303.605.728.809,00	294.042.213.023,00	96,85	288.962.709.258,00
Pajak Alat Berat	30.000.000,00	58.256.600,00	194,19	29.700.100,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.738.896.250,00	1.108.829.373,25	63,77	-
JUMLAH (Rp)	1.521.266.024.486,00	1.541.673.476.325,25	101,34	2.157.532.293.945,00

Jumlah Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 1.971.838 unit untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan 140.235 unit untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Wajib pungut untuk Pajak Bahan Bakar adalah Pertamina Patra Niaga, PT AKR Corporindo, Exxon Mobile, PT Petrolina Niaga Energi, PT Elnusa Petrofine, dan PT Energi Hijau Samoedra Bersaudara.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	22.967.094.300,00	23.394.277.800,00	101,86	38.683.847.600,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	44.008.749.300,00	44.908.666.700,00	102,04	69.952.909.100,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	320.880.558.375,00	327.076.247.775,00	101,93	513.718.294.350,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	4.775.653.700,00	4.869.044.600,00	101,96	6.652.048.100,00
PKB-Mobil Bus-Bus	781.793.900,00	787.557.600,00	100,74	1.377.016.500,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	34.242.944.400,00	34.950.089.400,00	102,07	53.412.613.150,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	26.409.301.200,00	26.979.491.300,00	102,16	43.615.068.500,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	199.539.433.125,00	203.092.294.825,00	101,78	314.251.188.600,00
JUMLAH (Rp)	653.605.528.300,00	666.057.670.000,00	101,91	1.041.662.985.900,00

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) BPKA DIY sebesar Rp 666.057.670.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Anggaran PKB sebesar Rp 118.640.107.600,00 dan realisasi sebesar Rp 120.721.000.600,00 untuk KPPD Kota Yogyakarta atau 101,75%
2. Anggaran PKB sebesar Rp 155.430.516.100,00 dan realisasi sebesar Rp 158.464.954.900,00 untuk KPPD Bantul atau 101,95%
3. Anggaran PKB sebesar Rp 48.762.836.300,00 dan realisasi sebesar Rp 49.691.845.500,00 untuk KPPD Kulon Progo atau 101,91%
4. Anggaran PKB sebesar Rp 56.833.260.000,00 dan realisasi sebesar Rp 57.886.789.300,00 untuk KPPD Gunungkidul atau 101,85%
5. Anggaran PKB sebesar Rp 273.938.808.300,00 dan realisasi sebesar Rp 279.293.079.700,00 untuk KPPD Sleman atau 101,95%.

Tabel III.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.928.968.700,00	1.891.782.400,00	64,59	6.037.989.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	12.249.403.700,00	10.050.474.300,00	82,05	27.524.065.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	82.775.021.200,00	85.829.525.200,00	103,69	219.318.554.600,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.714.088.600,00	4.197.923.400,00	244,91	6.545.601.300,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	269.569.600,00	660.570.100,00	245,05	2.138.120.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.167.500.100,00	10.084.673.600,00	123,47	17.769.035.900,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.506.309.600,00	5.473.181.000,00	99,40	12.003.918.600,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	70.184.137.900,00	83.692.277.600,00	119,25	162.619.785.000,00
JUMLAH (Rp)	183.794.999.400,00	201.880.407.600,00	109,84	453.957.069.400,00

Realisasi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melebihi target yang telah ditentukan karena terdapat banyak kendaraan roda empat dan kendaraan besar (bus) yang melakukan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di akhir tahun 2025.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) BPKA DIY sebesar Rp 201.880.407.600,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Anggaran BBNKB sebesar Rp 38.677.678.700,00 dan realisasi sebesar Rp 38.306.230.100,00 untuk KPPD Kota Yogyakarta atau 99,04%
2. Anggaran BBNKB sebesar Rp 41.400.784.000,00 dan realisasi sebesar Rp 48.782.260.900,00 untuk KPPD Bantul atau 117,83%
3. Anggaran BBNKB sebesar Rp 10.373.311.000,00 dan realisasi sebesar Rp 12.718.616.900,00 untuk KPPD Kulon Progo 122,61%
4. Anggaran BBNKB sebesar Rp 12.600.144.300,00 dan realisasi sebesar Rp 14.942.926.000,00 untuk KPPD Gunungkidul 118,59%
5. Anggaran BBNKB sebesar Rp 80.743.081.400,00 dan realisasi sebesar Rp 87.130.373.700,00 untuk KPPD Sleman 107,91%.

Tabel III.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	312.568.890.035,00	312.568.890.066,00	100,00	311.123.801.824,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	65.034.940.058,00	65.034.940.027,00	100,00	60.989.922.467,00
JUMLAH (Rp)	377.603.830.093,00	377.603.830.093,00	100,00	372.113.724.291,00

- PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp 312.568.890.066,00 merupakan pendapatan pajak bahan bakar bensin Pertalite sebesar Rp 223.251.879.207,00; Pertamina sebesar Rp 85.566.769.599,00; dan Pertamina Turbo sebesar Rp 3.750.241.260,00
- PBBKB-Bahan Bakar Solar sebesar Rp 65.034.940.027,00 merupakan pendapatan pajak bahan bakar Dexlite sebesar Rp 2.115.192.832,00; Bio Solar sebesar Rp 57.830.083.548,00; dan Pertamina Dex sebesar Rp 5.089.663.647,00.

Tabel III.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Air Permukaan (PAP)

URAIAN	2025		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pajak Air Permukaan			
KPPD Bantul	297.442.677,00	297.442.677,00	100,00%
KPPD Kulon Progo	226.452.357,00	248.534.741,00	109,75%
KPPD Gunungkidul	135.438.838,00	135.438.838,00	100,00%
KPPD Sleman	227.707.762,00	240.853.380,00	105,77%
JUMLAH (Rp)	887.041.634,00	922.269.636,00	103,97%

Realisasi pendapatan Pajak Rokok tidak sesuai dengan target karena penganggaran sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-134/PK.5/2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025, adapun realisasi berdasarkan:

1. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-53/PK.5/2025 tgl 29 April 2025 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan Desember TA 2024 dan TW I TA 2025 Tahap I untuk 30 Propinsi
2. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-76/PK.5/2025 tgl 30 Juli 2025 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan TW II TA 2025 Tahap I



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-122/PK.5/2025 tgl 23 Oktober 2025 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan TW III TA 2025
4. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-175/PK.5/2025 tgl 19 Desember 2025 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan TW IV TA 2025 Tahap I.

3.1.1.1.2. Retribusi Daerah **Rp 1.062.539.730,00** **Rp 1.030.316.927,00**

Retribusi Daerah BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.026.953.883,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.062.539.730,00 atau 103,47% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 32.222.803,00 atau 3,13% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1.030.316.927,00.

Tabel III.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
RETRIBUSI DAERAH				
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	151.140.000,00	151.020.000,00	99,92	150.740.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	875.813.883,00	911.519.730,00	104,08	879.576.927,00
JUMLAH (Rp)	1.026.953.883,00	1.062.539.730,00	103,47	1.030.316.927,00

- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dipergunakan untuk pemakaian ruangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk fotokopi sebesar Rp 87.000.000,00 dan kantin sebesar Rp 64.020.000,00
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipergunakan untuk Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan oleh BPKA (Induk) berupa sewa rumah dinas sebesar Rp 142.513.200,00 dan penggunaan tanah dan bangunan sebesar Rp 417.946.530,00. Selain itu, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah juga dipergunakan untuk pemakaian ruangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lahan parkir sebesar Rp 147.120.000,00; ATM sebesar Rp 61.800.000,00; workshop TNKB sebesar Rp 77.040.000,00; aula sebesar Rp 7.500.000,00; ruangan display kendaraan sebesar Rp 11.700.000,00; kantor kas sebesar Rp 32.100.000,00; serta ruangan display jasa raharja sebesar Rp 13.800.000,00.

3.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan **Rp 127.241.046.476,91** **Rp 120.935.677.671,93**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 126.006.483.045,00 dan direalisasikan sebesar Rp 127.241.046.476,91 atau 100,98% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 6.305.368.804,98 atau 5,21% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 120.935.677.671,93. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan BPKA meliputi rincian sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	311.808.099,00	597.284.704,39	191,56	735.407.168,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	24.422.124.500,00	28.938.474.579,00	118,49	61.431.097.950,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	43.185.707,00	-	36.388.533,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00	348.191.800,00	696,38	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	3.618.243.529,65	-	5.894.145.382,92
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	24.453.000,00	-	-
TOTAL (Rp)	56.080.709.335,00	70.179.811.734,04	125,14	107.926.045.474,92

- **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar sebesar Rp 1.624.425.625,00 dan direalisasikan sebesar Rp 2.719.973.024,00 atau 167,44% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 397.878.492,00) atau (12,76%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 3.117.851.516,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN				
Hasil Penjualan Tanah	-	-	-	25.000.000,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	535.600.000,00	1.008.472.400,00	188,29	2.645.996.016,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	1.088.825.625,00	1.491.175.625,00	136,95	195.750.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	220.324.999,00	-	251.105.500,00
JUMLAH (Rp)	1.624.425.625,00	2.719.973.024,00	167,44	3.117.851.516,00

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan dapat dirinci sebagai berikut:

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

1. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sesuai SK Penghapusan No. 38/SEKDA/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 sebesar Rp 110.600.000,00
2. Penjualan BMD berupa 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 dan 7 (Tujuh) unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 2 (Paket A) sesuai SK Penghapusan No. 57/SEKDA/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp 208.914.200,00
3. Penjualan BMD berupa 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 dan 5 (Lima) unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 2 (Paket B) sesuai SK Penghapusan No. 57/SEKDA/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp 59.176.400,00
4. Penjualan BMD berupa 2 (Dua) Unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 dan 8 (Delapan) unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 2 (Paket C) sesuai SK Penghapusan No. 57/SEKDA/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp 99.354.200,00
5. Pemusnahan dan Penghapusan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran Tahun Anggaran 2025 sesuai SK Penghapusan No. 50/SEKDA/IX/2025 tanggal 18 September 2025 sebesar Rp 43.363.500,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

6. Penjualan BMD berupa 9 (Unit) unit Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 2 (Paket D) sesuai SK Penghapusan No. 57/SEKDA/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp 32.464.100,00
7. Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY Tahun Anggaran 2025 sesuai SK Penghapusan No. 60/SEKDA/X/2025 sebesar Rp 50.000.000,00
8. Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemda DIY sesuai SK Penghapusan No. 21/SEKDA/III/ 2025 sebesar Rp 200.000.000,00
9. Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemda DIY sesuai SK Penghapusan No. 42/SEKDA/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 sebesar Rp 204.600.000,00.

Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan

1. Penjualan BMD berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Jaringan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY sesuai SK Penghapusan No. 20/SEKDA/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 sebesar Rp.370.000.000,00
2. Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan sesuai SK Penghapusan No. 32/SEKDA/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 sebesar Rp 58.200.000,00
3. Penjualan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan JJLS pada Segmen Garongan-Cogot sebesar Rp 35.000.000
4. Penjualan BMD berupa Jembatan Srandakan I (Jembatan Srandakan Lama) sesuai SK Penghapusan No. 54/SEKDA/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp 625.625.625,00
5. Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan, yang berlokasi di Gudang BPKA DIY d/a Jl. Abu Bakar Ali No. 2, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta sesuai SK Penghapusan No. 35/SEKDA/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 sebesar Rp 22.750.000,00
6. Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan sesuai SK Penghapusan No. 73/SEKDA/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 sebesar Rp 41.500.000,00
7. Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan sesuai SK Penghapusan No. 59/SEKDA/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 sebesar Rp 338.100.000,00.

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

1. Penjualan BMD berupa 17 ekor Hewan Ternak Kambing/Domba pada Balai Pengembangan Perbibtan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DPKP DIY sesuai SK Penghapusan No. 55/SEKDA/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp 15.200.000,00
2. Penjualan BMD berupa 9 (Sembilan) ekor Hewan Ternak Sapi pada Balai Pengembangan Perbibtan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DPKP DIY sesuai SK Penghapusan No. 55/SEKDA/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp 197.999.999,00
3. Penjualan BMD berupa Hasil Penebangan Pohon sebesar Rp 7.125.000,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Hasil Sewa BMD yang dianggarkan sebesar Rp 11.672.351.111,00 dan direalisasikan sebesar Rp 11.741.459.111,00 atau 100,59% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 632.622.931,00) atau (5,11%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 12.374.082.042,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN				
Hasil Sewa BMD	4.665.266.000,00	4.734.374.000,00	101,48	6.221.971.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	7.007.085.111,00	7.007.085.111,00	100,00	6.152.111.042,00
JUMLAH (Rp)	11.672.351.111,00	11.741.459.111,00	100,59	12.374.082.042,00

- Hasil Sewa BMD sebesar Rp 4.734.374.000,00 merupakan pembayaran atas sewa tanah dan bangunan milik Pemda DIY yang disewa oleh PT. Formula Land, PT. Surya Abhinaya Sentosa, PT. Avo Innovation Technology, PT. Yudhistira Mahadana Sampurna, Yayasan Yogyakarta Angga Binangun, Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif, KPN Sumber Rejeki, Pemkab Bantul, Komunitas Gayam, dan Penyewa Rumah Dinas.
- Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp 7.007.085.111,00 merupakan pembayaran pembagian keuntungan dan pembayaran kontribusi tetap dari PT. Setia Mataram Tritunggal untuk KSP Hotel Malioboro.

• **Jasa Giro**

Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp 8.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 4.875.380.592,00 atau 60,94% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 3.078.039.081,00) atau (38,70%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 7.953.419.673,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Jasa Giro

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
JASA GIRO				
Jasa Giro pada Kas Daerah	8.000.000.000,00	4.252.416.688,00	53,16	7.429.210.323,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	622.963.904,00	-	523.469.676,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	-	-	739.674,00
JUMLAH (Rp)	8.000.000.000,00	4.875.380.592,00	60,94	7.953.419.673,00

Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp 4.252.416.688,00 merupakan pendapatan yang diterima dari penempatan kas daerah di PT. Bank BPD DIY selama Tahun Anggaran 2025. Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp 622.963.904,00 merupakan pendapatan yang diterima dari penempatan kas yang ada di rekening bendahara dan PPTK selama Tahun Anggaran 2025. Penurunan Pendapatan Jasa Giro pada Tahun Anggaran 2025 dikarenakan adanya penurunan *rate* jasa giro BPD DIY dari sebelumnya 2,5% menjadi 1,5%.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tidak dianggarkan namun terdapat pendapatan yang dicatat sebesar Rp 4.800.000,00 dari Agustina Totowigati untuk pelunasan LUEP an UD Sidoarum.

• **Pendapatan Bunga**

Pendapatan Bunga dianggarkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 17.267.339.787,00 atau 172,67% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 896.126.577,00 atau 5,47% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 16.371.213.210,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN BUNGA				
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	17.267.339.787,00	172,67	16.371.213.210,00
JUMLAH (Rp)	10.000.000.000,00	17.267.339.787,00	172,67	16.371.213.210,00

Pendapatan Bunga BPKA Tahun 2025 sebesar Rp 17.265.125.656,00 berasal dari penempatan rekening deposito pada PT. Bank BPD DIY. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (halaman 206-208) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. Pengoptimalan *idle cash* timbul akibat adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Inpres 1 tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Bunga sebesar Rp 2.214.131,00 merupakan remunerasi atas saldo Treasury Deposit Facility (TDF).

• **Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah direalisasikan sebesar Rp 1.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 100.000,00 atau 11,11% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN				
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	1.000.000,00	-	900.000,00
JUMLAH (Rp)	-	1.000.000,00	-	900.000,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 1.000.000,00 merupakan penerimaan setoran pengembalian kerugian daerah atas nama Sudjono dari PD. Pertambangan.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 311.808.099,00 dan direalisasikan sebesar Rp 597.284.704,39 sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 138.122.463,61) atau (18,78%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 735.407.168,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda
atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN				
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	311.808.099,00	597.284.704,39	191,56	735.407.168,00
JUMLAH (Rp)	311.808.099,00	597.284.704,39	191,56	735.407.168,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan denda yang diakui oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari berbagai macam sektor dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas PUPESDM : keterlambatan pekerjaan penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Tahun Anggaran 2024, keterlambatan pekerjaan konstruksi pengeboran eksplor air Tahun Anggaran 2024, dan keterlambatan pekerjaan jalan Demakijo-Kebonagung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 58.328.191,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan : keterlambatan pekerjaan jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan bulan Januari-Oktober 2025 sebesar Rp 16.611.000,00
- Bapperida DIY : keterlambatan belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp 9.003.490,00
- Bakesbangpol : keterlambatan pekerjaan rehabilitasi atap sebesar Rp 4.809.054,00
- Badan Kepegawaian Daerah : keterlambatan pengadaan mebel interior sebesar Rp 14.000.000,00
- Dinas Perhubungan : keterlambatan pekerjaan studi evaluasi ruas jalan dan simpang DIY sebesar Rp 2.303.721,00
- Dinas Kesehatan : keterlambatan pekerjaan jasa konsultasi dokumen ANDALALIN dan AMDAL, keterlambatan pengadaan pelayanan kesehatan pot sputum, keterlambatan pengadaan pot sputum pelayanan kesehatan dan bahan kimia, keterlambatan pekerjaan belanja alat kesehatan dan alat kedokteran, dan keterlambatan belanja modal bangunan gedung rehab medik sebesar Rp 144.689.707
- Dinas Kebudayaan : keterlambatan penyelesaian cetak buku dokumentasi tari Bali, keterlambatan pekerjaan atas penataan fasad Malioboro, dan keterlambatan pekerjaan rehab gedung dan instalasi AC sebesar Rp 27.375.814,00
- Dinas Koperasi : keterlambatan pekerjaan penyelesaian PKL Ketandan Utama dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan eks Hotel Mutiara sebesar Rp 265.491.980,00
- Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup : keterlambatan pekerjaan belanja bahan kimia dan keterlambatan pekerjaan video dokumen sebesar Rp 823.162,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga : keterlambatan belanja modal alat praktik kejuruan dan rehab ruangan sekolah sebesar Rp 15.769.723,00
 - Denda keterlambatan Optimalisasi Tanah Desa untuk pertanian Desa Margoluwih sebesar Rp 17.234.570,00
 - Denda keterlambatan pengadaan barang Kalurahan Margokaton sebesar Rp 6.381.387,39
 - Denda Keterlambatan Empat Pilar Suvarna sebesar Rp 2.563.400,00
 - Denda keterlambatan KLB CV Cipta Buana sebesar Rp 5.641.676,00
 - Denda keterlambatan Oswald Multikreasi sebesar Rp 4.189.200,00
 - Denda keterlambatan pembangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH) Kalurahan Bendung, Semin, Gunungkidul sebesar Rp 1.006.825,00
 - Temuan IRDA Propinsi DIY atas keterlambatan pembangunan *Rest Area* BKK Desa Mandiri Budaya Kalurahan Katongan sebesar Rp 1.061.804,00
- **Pendapatan Denda Pajak Daerah**
Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 24.422.124.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp 28.938.474.579,00 atau 118,49% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 32.492.623.371,00) atau (52,89%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 61.431.097.950,00 dengan rincian:

Tabel III.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH				
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	24.241.748.900,00	28.674.383.600,00	118,29	60.385.186.350,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	180.375.600,00	261.057.900,00	144,73	1.045.911.600,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	-	3.033.079,00	-	-
JUMLAH (Rp)	24.422.124.500,00	28.938.474.579,00	118,49	61.431.097.950,00

- **Pendapatan Denda Retribusi Daerah**
Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan namun terdapat realisasi sebesar Rp 43.185.707,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 6.797.174,00 atau 18,68% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 36.388.533,00. Pendapatan Denda Retribusi Daerah bersumber dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha, dimana seluruh pendapatannya berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH				
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha				
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	36.388.533,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah- Pemanfaatan Aset Daerah	-	43.185.707,00	-	-
JUMLAH (Rp)	-	43.185.707,00	-	36.388.533,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආයතන විපක්ෂක සහකාර මණ්ඩලය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari denda retribusi daerah atas sewa rumah dinas sebesar Rp 12.756.707,00 dan biaya penggantian cetak STNK hilang sebesar Rp 30.429.000,00.

• **Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 348.191.800,00 atau 696,38%. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan pendapatan yang didapatkan dari wanprestasi pekerjaan yang telah dijamin pelaksanaannya dengan rincian:

- Wanprestasi Penjualan BMD berupa Gedung dan bangunan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY sebesar Rp 50.000.000,00
- Wanprestasi Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan an. Maskur sebesar Rp 15.000.000,00
- Wanprestasi belanja pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPESDM sebesar Rp 283.191.800,00.

• **Pendapatan dari Pengembalian**

Pendapatan dari Pengembalian tidak dianggarkan namun terdapat realisasi sebesar Rp 3.618.243.529,65 sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 2.275.901.853,27) atau (38,61%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 5.894.145.382,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN			-	
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	778.154.453,00	-	300.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	830.732.802,00	-	2.335.246.936,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	649.680,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	262.757.189,65	-	439.870.142,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-	94.444.756,00	-	26.314.945,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	-	1.819.580,00	-	12.777.526,83
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	3.150.000,00	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	-	770.605.123,00	-	3.069.594.276,09
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	94.867.027,00	-	9.391.877,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	-	11.831.000,00	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-	2.081.700,00	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	716.156.764,00	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	28.324.035,00	-	-



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආකෘතිමය පාලන කොමිෂන් සභාව
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	23.319.100,00	-	-
JUMLAH (Rp)		3.618.243.529,65		5.894.145.382,92

Pendapatan dari pengembalian merupakan setoran pengembalian belanja atas Tahun Anggaran yang sudah berlalu dan disetor tahun 2025, juga merupakan sebagian tindak lanjut temuan dari pemeriksaan Inpektorat, BPK, atau BPKP.

3.1.1.2. Pendapatan Transfer Rp 3.022.299.662.161,00 Rp 3.535.479.452.702,00

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 3.034.387.603.922,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.022.299.662.161,00 atau 99,60% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 513.179.790.541,00) atau (14,52%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 3.535.479.452.702,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 3.021.318.735.530,00 Rp 3.534.495.647.472,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 3.033.406.677.291,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.021.318.735.530,00 atau 99,60% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 513.176.911.942,00) atau (14,52%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 3.534.495.647.472,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
Dana Keistimewaan				
Dana Keistimewaan	976.134.243.366,00	976.134.243.366,00	100,00	1.396.157.452.432,00
Jumlah (Rp)	976.134.243.366,00	976.134.243.366,00	100,00	1.396.157.452.432,00
Dana Perimbangan				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	113.776.675.000,00	104.458.851.600,00	91,81	114.358.785.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.346.039.895.000,00	1.345.942.438.538,00	99,99	1.337.180.068.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	589.003.470.925,00	586.330.809.026,00	99,55	674.709.425.040,00
Jumlah (Rp)	2.048.820.040.925,00	2.036.732.099.164,00	99,41	2.126.248.278.040,00
Insentif Fiskal				
Insentif Fiskal	8.452.393.000,00	8.452.393.000,00	100,00	12.089.917.000,00
Jumlah (Rp)	8.452.393.000,00	8.452.393.000,00	100,00	12.089.917.000,00
Jumlah (Rp) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.033.406.677.291,00	3.021.318.735.530,00	99,60	3.534.495.647.472,00

- Dana Bagi Hasil (DBH) didasarkan pada realisasi penerimaan negara (pajak atau sumber daya alam). Jika realisasi penerimaan negara tidak mencapai target yang diproyeksikan dalam APBN, jumlah DBH yang disalurkan ke daerah juga akan disesuaikan, sehingga DBH yang disalurkan ke RKUD tidak sebesar 100%.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- Dana Alokasi Umum (DAU) direalisasikan berdasarkan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/MK/PK/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 atas daerah yang masih terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Pemda DIY masih memiliki sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK dan Dana Fasilitas Pananaman Modal sejumlah Rp 97.456.462,00 sehingga DAU dipotong sejumlah sisa dana tersebut.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Non Fisik), dimana realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) didasarkan pada jumlah nilai kontrak kegiatan yang telah disetujui oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) tidak mencapai 100%.

3.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 980.926.631,00 Rp 983.805.230,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 980.926.631,00 dan direalisasikan sebesar Rp 980.926.631,00 atau 100,00% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 2.878.599,00) atau (0,29%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 983.805.230,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.19
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	980.926.631,00	980.926.631,00	100,00	983.805.230,00
Jumlah (Rp)	980.926.631,00	980.926.631,00	100,00	983.805.230,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dirinci sebagai berikut:

- Bantuan keuangan kepada pemerintah DIY dari BPKAD Kota Yogyakarta untuk biaya *sharing* pengelolaan IPAL terpusat Tahun 2025 sebesar Rp 718.848.380,00
- Belanja bantuan keuangan khusus dari BPKAD Kabupaten Bantul kepada pemerintah provinsi untuk *sharing* dan kontribusi pengelolaan IPAL Sewon sebesar Rp 121.360.717,00
- Kontribusi biaya pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat dari BPKAD Kabupaten Sleman sebesar Rp 140.717.534,00

3.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 7.303.299.000,00 Rp 8.084.153.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 7.605.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 7.303.299.000,00 atau 96,03% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 780.854.000,00) atau (9,66%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 8.084.153.000,00. Pendapatan Hibah sebesar Rp 7.303.299.000,00 merupakan setoran sumbangan pengusaha dealer otomotif sebesar Rp 3.033.651.000,00; main dealer sebesar Rp 21.900.000,00; dan Jasa Raharja sebesar Rp 4.247.748.000,00. Hibah dari Dealer Otomotif tidak tercapai karena pembelian kendaraan roda dua lebih banyak daripada pembelian kendaraan roda empat.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආර්ථික විනිශ්චයකරණ කොමිෂන් සභාව
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

	2025	2024 (audited)
3.1.2. Belanja Daerah	<u>Rp 957.061.416.169,34</u>	<u>Rp 1.537.025.735.371,82</u>

Belanja Daerah BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.031.569.863.711,00 dan direalisasikan sebesar Rp 957.061.416.169,34 atau 92,77% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 579.964.319.202,48) atau (37,73%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2024 sebesar Rp 1.537.025.735.371,82 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1 Belanja Operasi	<u>Rp 88.881.177.651,00</u>	<u>Rp 103.542.451.454,00</u>
--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 100.666.756.416,00 dan direalisasikan sebesar Rp 88.881.177.651,00 atau 88,29% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 14.661.273.803,00) atau (14,16%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2024 sebesar Rp 103.542.451.454,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.20
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	74.051.251.816,00	64.216.860.816,00	86,72	80.614.113.785,00
Belanja Barang dan Jasa	26.615.504.600,00	24.664.316.835,00	92,67	22.928.337.669,00
Jumlah (Rp)	100.666.756.416,00	88.881.177.651,00	88,29	103.542.451.454,00

3.1.2.1.1. Belanja Pegawai	<u>Rp 64.216.860.816,00</u>	<u>Rp 80.614.113.785,00</u>
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 74.051.251.816,00 dan direalisasikan sebesar Rp 64.216.860.816,00 atau 86,72% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 16.397.252.969,00) atau (20,34%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 80.614.113.785,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.21
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA PEGAWAI				
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	27.858.031.689,00	18.134.306.282,00	65,10	18.438.622.450,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.193.220.127,00	46.082.554.534,00	99,76	9.481.431.335,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	52.694.060.000,00
Jumlah (Rp)	74.051.251.816,00	64.216.860.816,00	86,72	80.614.113.785,00

Tunjangan Fungsional PPPK belum direalisasikan karena belum terdapat SK Fungsional PPPK serta Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum direalisasikan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang Tapera.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආකෘති පිළිගැනීමේ කාර්යාලය
Kantor Pelayanan Pajak Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- **Belanja Jasa Kantor**

Belanja Jasa Kantor BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 13.709.809.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 12.734.925.422,00 atau 92,89% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 582.334.942,00 atau 4,79% dari tahun anggaran 2024 sebesar Rp 12.152.590.480,00. Belanja ini digunakan untuk membayar tagihan utilitas (listrik, air, dan telepon) serta layanan telekomunikasi internet, termasuk jaringan VPN-IP dan langganan WA *Reminder/Blasting* untuk pelayanan KPPD DIY. Belanja ini juga digunakan untuk membayar jasa pihak ketiga, yaitu jasa keamanan dan kebersihan di lingkungan BPKA DIY. Selain itu, terdapat pengeluaran untuk honorarium petugas, mulai dari tenaga pelayanan Samsat, pengelola keuangan, pengurus barang, hingga narasumber kegiatan sosialisasi. Belanja Jasa Kantor juga dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas seperti pengelolaan sampah, pemeliharaan *septic tank* yang penuh, pengendalian hama, serta kewajiban administrasi kendaraan dinas berupa pembayaran pajak (PKB), STNK, dan SWDKLLJ guna mendukung kelancaran pelayanan publik dan tata kelola aset daerah yang optimal.

- **Belanja luran Jaminan/Asuransi**

Belanja luran Jaminan/Asuransi BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 490.025.509,00 atau 98,01% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 580.854,00 atau 0,12% dari tahun anggaran 2024 sebesar Rp 489.444.655,00. Belanja luran Jaminan/Asuransi merupakan pembayaran asuransi Barang Milik Daerah dengan Polis Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi Gedung Kantor Milik Pemerintah DIY sesuai Surat Pesanan No. EP-01JZVQDX7PQF692PCGC5EDAACB tanggal 16 Juli 2025 sebesar Rp 289.755.509,00 dan pembayaran asuransi Barang Milik Daerah dengan Polis Asuransi Kendaraan Roda Empat Keatas Milik Pemerintah DIY sesuai dengan Surat Pesanan No. EP-01K03KTXX3KCV4788DT9W0TVZZ tanggal 16 Juli 2025 sebesar Rp 200.270.000,00.

- **Belanja Sewa Tanah**

Belanja Sewa Tanah BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 16.140.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 11.862.900,00 atau 73,50% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 564.900,00 atau 5,00% dari tahun anggaran 2024 sebesar Rp 11.298.000,00. Belanja Sewa Tanah digunakan untuk menyewa Tanah Kas Desa Bangunharjo oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul sesuai kontrak No. 900/3102 untuk perluasan Samsat Pembantu Sewon.

- **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 520.667.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 498.186.578,00 atau 95,68% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 169.082.741,00 atau 51,38% dari tahun anggaran 2024 sebesar Rp 329.103.837,00. Belanja sewa peralatan dan mesin dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan pemeliharaan fasilitas di BPKA DIY selama Tahun Anggaran 2025. Belanja ini juga digunakan untuk membayar jasa sewa kendaraan angkutan barang, terutama dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan penataan arsip di lingkungan BPKA DIY. Selain itu, terdapat pengeluaran rutin bulanan untuk sanitasi dan pengharum ruangan di KPPD DIY. Kebutuhan penunjang lainnya mencakup sewa mesin fotokopi, penyewaan *Safe Deposit Box*, serta penyediaan fasilitas permainan anak di ruang tunggu KPPD DIY yang dibayarkan sepanjang Tahun Anggaran 2025.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 262.400.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 259.400.000,00 atau 98,86% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 16.950.000,00 atau 6,99% dari realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp 242.450.000,00. Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan digunakan untuk biaya sewa tempat dan gedung pertemuan untuk mendukung kegiatan operasional Layanan Samsat Desa dan kegiatan Sosialisasi Perpajakan di berbagai wilayah DIY pada Tahun Anggaran 2025. Alokasi dana terbesar digunakan untuk sewa tempat pelayanan di Samsat Corner Galeria Mall sebesar Rp 150.000.000,00.

• **Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 90.240.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 89.700.000,00 atau 99,40% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 17.550.000,00) atau (16,36%) dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp 107.250.000,00. Belanja sewa aset tetap lainnya merupakan pembayaran atas sewa tanaman di BPKA DIY selama tahun anggaran 2025.

• **Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 99.245.100,00 atau 99,25% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 55.500,00) atau (0,06%) dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 99.300.600,00. Belanja jasa konsultansi konstruksi merupakan pembayaran atas kajian pemanfaatan BMD Eks Hotel Mutiara II di Jalan Malioboro Yogyakarta berdasarkan SPK No. B/00.3.2.2/5601/B2 tanggal 4 Juni 2025.

• **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.947.350.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.639.964.206,00 atau 84,22% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 91.539.586,00) atau (5,29%) dari realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.731.503.792,00.

Tabel III.23

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA JASA			
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi			
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	296.000.000,00	290.103.006,00	98,01
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.556.350.000,00	1.255.961.200,00	80,70
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	95.000.000,00	93.900.000,00	98,84
Jumlah (Rp)	1.947.350.000,00	1.639.964.206,00	84,22

• **Belanja Pemeliharaan Tanah**

Belanja Pemeliharaan Tanah BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 99.650.000,00 atau 99,65%. Belanja Pemeliharaan Tanah digunakan untuk membayar tagihan pembersihan lahan dan pemagaran Barang Milik Daerah di Gunung Sempu, Bantul berdasarkan SPK No. B/00.3.2.2/11221/B2 tanggal 28 Oktober 2025.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.296.810.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 2.265.599.292,00 atau 98,64% sehingga mengalami penurunan dari realisasi tahun 2024 sebesar (Rp 133.771.403,00) atau (5,58%) dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp 2.399.370.695,00. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel III.24
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA JASA			
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
Belanja Pemeliharaan Alat Besar	437.977.000,00	434.414.332,00	99,19
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan	135.800.000,00	118.789.160,00	87,47
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	404.413.000,00	402.794.100,00	99,60
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	21.491.000,00	21.491.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer	1.297.129.000,00	1.288.110.700,00	99,30
Jumlah (Rp)	2.296.810.000,00	2.265.599.292,00	98,64

• **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 855.072.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 812.713.312,00 atau 95,05% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 263.226.959,00 atau 47,90% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 549.486.353,00. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan digunakan untuk membayar pemeliharaan rutin, perbaikan fisik, dan pengamanan gedung dan bangunan milik Pemda DIY yang mencakup gedung KPPD DIY, rumah dinas, serta gedung penyimpanan seperti Gudang Badran Jetis, Depo Arsip Kotagede, dan Gudang BPKA DIY Abu Bakar Ali Kotabaru.

• **Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 39.786.000,00 atau 99,47% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 10.178.400,00 atau 34,38% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 29.607.600,00. Belanja ini digunakan untuk pemeliharaan jaringan listrik di KPPD Kota dan KPPD Bantul selama Tahun Anggaran 2025.

• **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 416.298.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 395.697.696,00 atau 95,05% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 373.730.922,00) atau (48,57%) dari tahun anggaran 2024 sebesar Rp 769.428.618,00. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 149.262.696,00
- Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp 130.035.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp 113.400.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp 3.000.000,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.2.2 Belanja Modal

Rp 1.010.929.555,00

Rp 2.049.908.956,00

Belanja Modal BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.038.599.523,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.010.929.555,00 atau 97,34% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 1.038.979.401,00) atau (50,68%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 2.049.908.956,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.25

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	650.795.860,00	628.539.055,00	96,58	1.703.960.146,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	387.803.663,00	382.390.500,00	98,60	345.948.810,00
Jumlah (Rp)	1.038.599.523,00	1.010.929.555,00	97,33	2.049.908.956,00

3.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp 628.539.055,00

Rp 1.703.960.146,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 650.795.860,00 dan direalisasikan sebesar Rp 628.539.055,00 atau 96,58% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 1.075.421.091,00) atau (63,11%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 1.703.960.146,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.26

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			
Belanja Modal Alat Besar	4.620.000,00	4.619.200,00	99,98
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	66.061.000,00	65.729.260,00	99,50
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.360.000,00	2.398.400,00	55,01
Belanja Modal Komputer	575.754.860,00	555.792.195,00	96,53
JUMLAH (Rp)	650.795.860,00	628.539.055,00	96,58

3.1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp 382.390.500,00

Rp 345.948.810,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 387.803.663,00 dan direalisasikan sebesar Rp 382.390.500,00 atau 98,60% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 36.441.690,00 atau 10,53% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 345.948.810,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk:

- Landscape Samsat Sewon Area Cek Fisik KPPD DIY di Kabupaten Bantul sebesar Rp 106.000.000,00
- Pemasangan kanopi tempat cek fisik kendaraan KPPD DIY di Kabupaten Sleman sebesar Rp 42.000.000,00
- Pemasangan Kanopi Samsat Sewon Area Cek Fisik dan Pelayanan Pajak 5 Tahunan KPPD DIY di Kabupaten Bantul sebesar Rp 38.863.000,00
- Rehabilitasi Gudang Barang Milik Daerah di Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta sebesar Rp 195.527.500,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.2.3. Belanja Tidak Terduga Rp 3.405.377.000,00 Rp 20.000.000,00

Belanja Tidak Terduga BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 39.476.792.633,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.405.377.000,00 atau 8,63% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 3.385.377.000,00 atau 16,92% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 20.000.000,00. Belanja Tidak Terduga direalisasikan untuk penanganan darurat bencana sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebesar Rp 1.072.577.000,00 dan bantuan biaya jatah hidup korban banjir Sumatera sebesar Rp 2.332.800.000,00.

3.1.2.4. Belanja Transfer Rp 863.763.931.963,34 Rp 1.431.413.374.961,82

Belanja Transfer BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 890.387.715.139,00 dan direalisasikan sebesar Rp 863.763.931.963,34 atau 97,00% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 567.649.442.998,48) atau (39,66%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 sebesar Rp 1.431.413.374.961,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	547.966.592.107,00	541.272.131.059,00	98,78	870.359.406.509,00
Belanja Bantuan Keuangan	342.421.123.032,00	322.491.800.904,34	94,15	561.053.968.452,82
Jumlah (Rp)	890.387.715.139,00	863.763.931.963,34	97,00	1.431.413.374.961,82

• **Belanja Bagi Hasil**

Belanja Bagi Hasil BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 547.966.592.107,00 dan direalisasikan sebesar Rp 541.272.131.059,00 atau 98,78% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 329.087.275.450,00) atau (37,81%) dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp 870.359.406.509,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.28
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA BAGI HASIL				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten	465.270.147.223,00	459.498.612.174,00	98,76	719.748.610.040,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota	82.696.444.884,00	81.773.518.885,00	98,88	150.610.796.469,00
Jumlah (Rp)	547.966.592.107,00	541.272.131.059,00	98,78	870.359.406.509,00

• **Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja Bantuan Keuangan BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 342.421.123.032,00 dan direalisasikan sebesar Rp 322.491.800.904,34 atau 94,17% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 238.562.167.548,48) atau (42,52%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 561.053.968.452,82.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.29

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA BANTUAN KEUANGAN				
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	197.905.896.382,00	180.781.170.273,84	91,34	428.964.512.711,77
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	141.515.226.650,00	138.710.630.630,50	98,02	132.089.455.741,05
Jumlah (Rp)	342.421.123.032,00	322.491.800.904,34	94,15	561.053.968.452,82

- Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan dialokasikan seluruhnya untuk penanggulangan bencana alam di tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Masing-masing provinsi menerima alokasi dana yang sama, yakni sebesar Rp 1.000.000.000,00. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemulihan infrastruktur serta meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah di wilayah masing-masing.
- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 197.905.896.382,00 dan direalisasikan sebesar Rp 180.781.170.273,84 atau 91,34% dan dialokasikan melalui Dana Keistimewaan (DAIS) dalam tiga tahap penyaluran kepada Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Selain Dana Keistimewaan, terdapat alokasi khusus untuk Tambahan Penghasilan Karangkopek yang disalurkan ke Kabupaten Bantul (Kalurahan Jagalan dan Trimurti) serta Kabupaten Kulon Progo (Kalurahan Kalirejo, Hargotirto, dan Hargowilis).
- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 141.515.226.650,00 dan direalisasikan sebesar Rp 138.710.630.630,50 atau 98,02% dan dialokasikan untuk 21 kegiatan BKK Kalurahan dengan rincian:

Tabel III.30

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

No.	Kegiatan BKK	SP2D (Rp)	STS Pengembalian (Rp)
1	Padat Karya Jogja Istimewa	11.040.000.000,00	(36.642.462,26)
2	Desa Mandiri Budaya	17.254.733.900,00	(150.719.617,10)
3	Reformasi Kalurahan	39.100.000.000,00	(1.419.346.832,75)
4	Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan	2.000.000.000,00	(22.958.590,00)
5	Desa Budaya	800.000.000,00	(34.253.200,00)
6	Desa Wisata	5.054.053.200,00	(72.840.373,29)
7	Desa Preneur	2.213.150.000,00	(12.084.233,25)
8	Desa Mandiri Pangan	3.488.278.000,00	(31.874.125,00)
9	Pengelolaan Sampah	2.742.500.000,00	(16.430.000,00)
10	Tertib Administrasi Pertanahan	18.010.409.300,00	(726.851.152,62)
11	Desa Maritim	700.000.000,00	(3.635.500,00)
12	Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)	18.200.000.000,00	(15.085.923,12)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ບ້ານພາກປະເທດສາມາດສູນປະເທດພາກພື້ນຊຸມຊົນ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

No.	Kegiatan BKK	SP2D (Rp)	STS Pengembalian (Rp)
13	Desa Prima	1.487.150.000,00	(1.470.000,00)
14	Karangkopek	1.000.000.000,00	(5.914.454,00)
15	Kawasan Terpadu	12.720.941.750,00	(90.131.506,11)
16	Kampung Berkah	100.000.000,00	-
17	Desa Niaga	1.000.000.000,00	(13.191.050,00)
18	Warisan Budaya Tak Benda	200.000.000,00	(17.656.700,00)
19	Balai Budaya	3.244.920.000,00	(40.496.500,00)
20	Demplot Jogja Hijau	520.823.000,00	(2.354.300,00)
21	Kompensasi Dampak Negatif TPA/TPST Regional	550.000.000,00	(2.392.000,00)
Jumlah (Rp)		141.426.959.150,00	(2.716.328.519,50)
Total Belanja Bantuan Keuangan Khusus (SP2D – STS Pengembalian)			138.710.630.630,50

3.1.2.5. Surplus/Defisit Rp 3.812.698.419.257,86 Rp 4.393.962.204.349,03

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 3.714.803.410.960,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.812.698.419.257,86 atau 102,63%. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi Pendapatan Daerah dengan total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Surplus Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp 581.263.785.091,17) atau (13,23%) dibandingkan dengan Surplus Tahun 2024 sebesar Rp 4.393.962.204.349,03. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.31
Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
SURPLUS/DEFISIT				
Pendapatan Daerah	4.746.373.274.671,00	4.769.759.835.427,20	100,49	5.930.987.939.720,85
Belanja Daerah	1.031.569.863.711,00	957.061.416.169,34	92,77	1.537.025.735.371,82
Jumlah (Rp)	3.714.803.410.960,00	3.812.698.419.257,86	102,63	4.393.962.204.349,03

**3.1.3. Pembiayaan Daerah 2025 2024 (audited)
Rp 280.267.729.284,44 Rp 93.121.146.320,48**

Pembiayaan Daerah BPKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 277.154.229.284,00 dan direalisasikan sebesar Rp 280.267.729.284,44 atau 101,12% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 187.146.582.963,96 atau 200,97% dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2024 sebesar Rp 93.121.146.320,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.32
Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	437.696.229.284,00	437.696.229.284,44	100,00	295.260.470.320,48
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	71.500.000,00	-	360.676.000,00
Jumlah (Rp)	437.696.229.284,00	437.767.729.284,44	100,01	295.621.146.320,48



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	2025			2024
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan				
Penyertaan Modal Daerah	155.542.000.000,00	155.000.000.000,00	99,65	200.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	50,00	2.500.000.000,00
Jumlah (Rp)	160.542.000.000,00	157.500.000.000,00	98,10	202.500.000.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH	277.154.229.284,00	280.267.729.284,44	101,12	93.121.146.320,47

• **Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 157.500.000.000,00 merupakan penerimaan pembiayaan yang didapat dari SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 437.696.229.284,44 dengan rincian:

- Pelampauan Penerimaan PAD sebesar Rp 142.955.873.464,00
- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.733.888.090,00
- Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 227.913.000,00
- Penghematan Belanja sebesar Rp 291.778.554.730,44

Ditambah dengan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp 371.500.000,00.

• **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 157.500.000.000,00 merupakan pembiayaan atas:

- Belanja Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebesar Rp 155.000.000.000,00
- Pemberian Pinjaman Dana Bergulir kepada Masyarakat Dana Bergulir kepada BUKP Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, dan 7 BUKP se-DIY sebesar Rp 2.500.000.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘති පිළිගැනීමේ කාර්යාලය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

	2025	2024 (audited)
3.1.4. Aset	Rp 4.041.659.133.521,69	Rp 3.741.261.694.686,76

Aset BPKA per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.041.659.133.521,69 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 388.942.265.999,04; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp 2.709.942.098.547,86; Aset Tetap sebesar Rp 763.380.752.459,15; Aset Lainnya sebesar Rp 47.089.974.294,48; dan Properti Investasi sebesar Rp 132.304.042.221,16.

3.1.4.1. Aset Lancar	Rp 388.942.265.999,04	Rp 404.671.660.924,39
-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Aset Lancar BPKA per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 388.942.265.999,04 terdiri dari Kas dan Setara Kas sebesar Rp 385.633.412.458,69; Piutang Pajak Daerah sebesar Rp 37.046.300,00; Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 343.335.172,18; Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 2.558.369.613,55; Penyisihan Piutang sebesar (Rp 2.613.931.582,85); Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 347.139.103,34 dan Persediaan sebesar Rp 2.636.894.934,13.

3.1.4.1.1. Kas dan Setara Kas	Rp 385.633.412.458,69	Rp 401.871.389.579,29
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp 385.633.412.458,69 merupakan saldo awal Kas di Kas Daerah sebesar Rp 401.871.389.579,29 ditambah dan dikurangi dengan perhitungan sebagai berikut:

- Ditambah Setoran Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp 37.854.231,00
- Ditambah STS Pengembalian Belanja sebesar Rp 4.284.011.424.242,79
- Ditambah pengembalian TPG sebesar Rp 90.363.046,00
- Ditambah penerimaan pembiayaan sebesar Rp 71.500.000,00
- Dikurangi SP2D Belanja sebesar (Rp 4.142.849.062.292,39)
- Dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar (Rp 157.500.000.000,00)
- Dikurangi *subsequent event* sebesar (Rp 100.056.348,00)

3.1.4.1.2. Piutang Pajak Daerah	Rp 37.046.300,00	Rp 116.492.000,00
--	-------------------------	--------------------------

Saldo Piutang Pajak Daerah BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 37.046.300,00 terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 34.991.300,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 2.055.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 33
Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah

No.	PIUTANG PAJAK DAERAH	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		31-12-2024			31-12-2025
	PIUTANG PKB	82.854.000,00	-	47.862.700,00	34.991.300,00
1	KPPD Kota	29.432.300,00	-	-	29.432.300,00
2	KPPD Bantul	18.912.000,00	-	18.912.000,00	-
3	KPPD KP	5.559.000,00	-	-	5.559.000,00
4	KPPD Sleman	28.950.700,00	-	28.950.700,00	-
	PIUTANG BBNKB	33.638.000,00	-	31.583.000,00	2.055.000,00
1	KPPD Kota	2.055.000,00	-	-	2.055.000,00
2	KPPD Bantul	3.422.000,00	-	3.422.000,00	-
3	KPPD Sleman	28.161.000,00	-	28.161.000,00	-
	JUMLAH (Rp)	116.492.000,00	-	79.445.700,00	37.046.300,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.34
Kategori Umur Piutang Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	2025	2024
<1 Tahun	Lancar	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	-	2.092.500,00
>5 Tahun	Macet	37.046.300,00	114.399.500,00
JUMLAH (Rp)		37.046.300,00	116.492.000,00

Tabel III.35
Kategori Umur Piutang Pajak Daerah per Unit Kerja

UNIT KERJA	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH (Rp)
	<1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	>5 Tahun	
KPPD Kota	-	-	-	31.487.300,00	31.487.300,00
KPPD Bantul	-	-	-	-	-
KPPD Gunungkidul	-	-	-	-	-
KPPD Kulon Progo	-	-	-	5.559.000,00	5.559.000,00
KPPD Sleman	-	-	-	-	-
Jumlah (Rp)	-	-	-	37.046.300,00	37.046.300,00

3.1.4.1.3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **Rp 343.335.172,18** **Rp 185.156.692,98**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 343.335.172,18 merupakan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang merupakan pengakuan piutang atas dividen BUKP Wates yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 185.156.692,98 ditambah dengan koreksi BPK sebesar Rp 158.178.479,20 karena deviden BUKP Kokap sebesar Rp 43.368.636,22 dan BUKP Lendah sebesar Rp 114.809.842,98 belum disetorkan ke Pemda DIY.

3.1.4.1.4. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah **Rp 2.558.369.613,55** **Rp 2.598.261.613,55**

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.558.369.613,55 terdiri dari Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp 2.050.000,00; Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp 9.865.850,00; Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp 209.348.281,55; dan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp 2.337.105.482,00; dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 36
Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		31-12-2024			31-12-2025
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	28.957.850,00	-	19.092.000,00	9.865.850,00
3	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian	210.348.281,55	-	1.000.000,00	209.348.281,55
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.356.905.482,00	-	19.800.000,00	2.337.105.482,00
	TOTAL	2.598.261.613,55	-	39.892.000,00	2.558.369.613,55



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.050.000,00 merupakan Piutang Hasil Sewa BMD berupa tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014. Terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2012 tanah tersebut telah diserahkan kembali kepada Pemda DIY karena penyewa sudah tidak sanggup untuk membayar sewa. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp 2.050.000,00 tersebut dalam kategori macet.

• **Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 9.865.850,00 seluruhnya bersumber dari Piutang Pendapatan Denda PKB yang telah ditetapkan namun belum dibayar oleh Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.37

Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per Unit Kerja

No.	PIUTANG PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		31-12-2024			31-12-2025
	PIUTANG PENDAPATAN DENDA PKB	27.079.650,00	-	17.213.800,00	9.865.850,00
1	KPPD Kota	9.717.450,00	-	-	9.717.450,00
2	KPPD Bantul	11.077.600,00	-	11.077.600,00	-
3	KPPD GK	-	-	-	-
4	KPPD KP	148.400,00	-	-	148.400,00
5	KPPD Sleman	6.136.200,00	-	6.136.200,00	-
	PIUTANG PENDAPATAN DENDA BBNKB	1.878.200,00	-	1.878.200,00	-
1	KPPD Kota	-	-	-	-
2	KPPD Bantul	607.000,00	-	607.000,00	-
3	KPPD GK	-	-	-	-
4	KPPD KP	-	-	-	-
5	KPPD Sleman	1.271.200,00	-	1.271.200,00	-
	JUMLAH (Rp)	28.957.850,00	-	19.092.000,00	9.865.850,00

Tabel III.38

Kategori Umur Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	2025
Belum jatuh tempo	Lancar	-
1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama	Kurang Lancar	-
1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua	Diragukan	-
1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga	Macet	9.865.850,00
JUMLAH (Rp)		9.865.850,00

Tabel III.39

Kualitas Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per Unit Kerja

UNIT KERJA	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH (Rp)
	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
KPPD Kota	-	-	-	9.717.450,00	9.717.450,00
KPPD Bantul	-	-	-	-	-
KPPD Kulon Progo	-	-	-	148.400,00	148.400,00
KPPD Sleman	-	-	-	-	-
JUMLAH (Rp)	-	-	-	9.865.850,00	9.865.850,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- **Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah per 31 Desember 2025 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp 209.348.281,55 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel III.40

Rincian Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No.	PIUTANG PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		31-12-2024			31-12-2025
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	210.348.281,55	-	1.000.000,00	209.348.281,55
	JUMLAH (Rp)	210.348.281,55	-	1.000.000,00	209.348.281,55

Piutang Piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dibayarkan oleh Sudjono dari Biro Perekonomian Unit Pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 1.000.000,00 pada tahun anggaran 2025.

- **Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.337.105.482,00 terdiri atas Piutang Bunga Dana Bergulir sebesar Rp 2.218.331.482,00 dan Piutang Denda Dana Bergulir sebesar Rp 118.774.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.41

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

No.	PIUTANG HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR (BUNGA DAN DENDA)	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		31-12-2024			31-12-2025
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	41.400.000,00	-	15.000.000,00	26.400.000,00
2	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	156.625.000,00	-	4.800.000,00	151.825.000,00
3	Dinas Koperasi dan UKM	2.140.856.482,00	-	-	2.140.856.482,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.024.000,00	-	-	18.024.000,00
	JUMLAH (Rp)	2.356.905.482,00	-	19.800.000,00	2.337.105.482,00

- Piutang Bunga Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan termasuk di dalamnya DPM LUEP dan DPM PHP sebesar Rp 9.900.000,00 serta Piutang Denda Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan termasuk di dalamnya DPM LUEP dan DPM PHP sebesar Rp 16.500.000,00
- Piutang Bunga Dana Bergulir di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan termasuk di dalamnya LPDM, Gapoktan Tahap Pra Petumbuhan, Penguatan LPDM, dan DPM LUEP (pelimpahan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) sebesar Rp 57.075.000,00 serta Piutang Denda Dana Bergulir di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp 94.750.000,00
- Piutang Bunga Dana Bergulir di Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp 2.140.856.482,00
- Piutang Bunga Dana Bergulir di Dinas Kelautan dan Perikanan termasuk di dalamnya DPM Tahun 2012 dan DPM Tahun 2013 sebesar Rp 10.500.000,00 serta Piutang Denda Dana Bergulir di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 7.524.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ꦧꦏꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦤ꧀ꦏꦺꦸꦁꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦠ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.4.1.5. Penyisihan Piutang (Rp 2.613.931.582,85) (Rp 2.721.001.932,84)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, aset berupa piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sehingga nilai piutang harus disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Perhitungan penyisihan piutang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar : Belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (Penyisihan 0,5%)
2. Kualitas Kurang Lancar : Belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Surat Tagihan Pertama (Penyisihan 10%)
3. Kualitas Diragukan : Belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Surat Tagihan Kedua (Penyisihan 50%)
4. Kualitas Macet : Belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara (Penyisihan 100%)

Penyisihan Piutang BPKA per 31 Desember 2025 sebesar (Rp 2.613.931.582,85) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar (Rp 37.046.300,00); Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar (Rp 18.515.669,30); dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar (Rp 2.558.369.613,55) dengan rincian sebagai berikut:

• **Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah BPKA per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp 37.046.300,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.42
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	PRESENTASE PENYISIHAN	PIUTANG PAJAK DAERAH	PENYISIHAN PIUTANG
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	-	-
>5 Tahun	Macet	100%	37.046.300,00	(37.046.300,00)
JUMLAH (Rp)			37.046.300,00	(37.046.300,00)

Tabel III.43
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per Unit Kerja

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	%	KPPD KOTA	KPPD BANTUL	KPPD KP	KPPD SLEMAN	JUMLAH (Rp)
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-	-	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-	-	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	-	-	-	-	-
>5 Tahun	Macet	100%	(31.487.300,00)	-	(5.559.000,00)	-	(37.046.300,00)
JUMLAH (Rp)			(31.487.300,00)	-	(5.559.000,00)	-	(37.046.300,00)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar (Rp 18.515.669,30) merupakan penyisihan atas piutang deviden BUKP Wates yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan rincian penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel III.44
Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

URAIAN	SALDO AWAL PIUTANG	MUTASI TAHUN 2025		SALDO AKHIR PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	KETERANGAN
		BERTAMBAH	BERKURANG			
Piutang Dividen BUKP Wates	185.156.692,98	-	-	185.156.692,98	(18.515.669,30)	Piutang Kurang Lancar (10%)
Jumlah (Rp)	185.156.692,98	-	-	185.156.692,98	(18.515.669,30)	

• **Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah BPKA per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp 2.558.369.613,55) terdiri dari Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar (Rp 2.050.000,00), Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar (Rp 9.865.850,00); Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar (Rp 2.337.105.482,00), dan Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar (Rp 209.348.281,55) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.45
Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pos Neraca	Saldo Akhir	Jatuh Tempo	Usia Piutang	Penyisihan Piutang	
	31-12-2025				
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH					
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan					
Penyewaan Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman	2.050.000,00	31-12-2014	Macet	100%	(2.050.000,00)
Jumlah (Rp)	2.050.000,00				(2.050.000,00)

Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penyisihan piutang dari Penyewaan Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman sebesar Rp 2.050.000,00 yang jatuh tempo sejak 31 Desember 2014.

Tabel III.46
Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	PRESENTASE PENYISIHAN	PIUTANG PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	PENYISIHAN PIUTANG
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	-	-
>5 Tahun	Macet	100%	9.865.850,00	(9.865.850,00)
JUMLAH (Rp)			9.865.850,00	(9.865.850,00)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.47

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per Unit Kerja

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	%	KPPD KOTA	KPPD BANTUL	KPPD KP	KPPD SLEMAN	JUMLAH (Rp)
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-	-	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-	-	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	-	-	-	-	-
>5 Tahun	Macet	100%	(9.717.450,00)	-	(148.400,00)	-	(9.865.850,00)
JUMLAH (Rp)			(9.717.450,00)	-	(148.400,00)	-	(9.865.850,00)

Tabel III.48

Rincian Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pos Neraca	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Jatuh Tempo	Usia Piutang	Penyisihan Piutang	
	31-12-2024	Bertambah	Berkurang	31-12-2025				
Piutang TGR								
Sudjono, Biro Perekonomian	20.468.136,55	-	1.000.000,00	19.468.136,55	s.d. Juli 2014 macet, mulai Agustus 2014 melakukan pembayaran	Macet	100%	(19.468.136,55)
40 Anggota DPRD DIY Periode 1999-2004 dan 2004-2009	189.880.145,00	-	-	189.880.145,00	Jatuh tempo 1 Sep 2011 untuk yang ber-SKTJM 1 Sep 2009 dan 1 April untuk yang ber-SKTJM 1 April 2010	Macet	100%	(189.880.145,00)
Jumlah (Rp)	210.348.281,55	-	900.000,00	209.348.281,55				(209.348.281,55)

Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan penyisihan piutang dari Sudjono, Biro Perekonomian dan 40 (empat puluh) Anggota DPRD DIY Periode 1999-2004 dan 2004-2009. Pada Tahun Anggaran 2025, piutang yang berhasil tertagih sebesar Rp 1.000.000,00 sehingga penyisihan piutang yang tersisa adalah sebesar (Rp 209.348.281,55).

Tabel III.49

Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

PIUTANG	PIUTANG (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG (Rp)
Piutang Bunga Dana Bergulir	2.218.331.482,00	(2.218.331.482,00)
Piutang Denda Dana Bergulir	118.774.000,00	(118.774.000,00)
JUMLAH (Rp)	2.337.105.482,00	(2.337.105.482,00)

- Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir sebesar (Rp 2.218.331.482,00) merupakan penyisihan atas piutang bunga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar (Rp 9.900.000,00); Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar (Rp 57.075.000,00); Dinas Koperasi dan UKM sebesar (Rp 2.140.856.482,00); serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar (Rp 10.500.000,00)
- Penyisihan Piutang Denda Dana Bergulir sebesar (Rp 118.774.000,00) merupakan penyisihan atas piutang denda dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar (Rp 16.500.000,00); Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar (Rp 94.750.000,00); serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar (Rp 7.524.000,00).



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.4.1.6. Beban Dibayar Dimuka Rp 347.139.103,34 Rp 296.990.296,74

- Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp 289.755.509,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2025 sampai dengan 20 Juli 2026. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 129.397.665,66 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 160.357.843,34
- Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp 200.270.000,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2025 sampai dengan 20 Juli 2026. Premi Asuransi Kendaraan Dinas tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 89.435.643,84 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 110.834.356,16
- Sewa Ruang PT. Sawokembar Galeria Mall untuk pelayanan Samsat Corner Galeria sebesar Rp 150.000.000,00 dengan masa sewa 1 Mei 2025 sampai dengan 30 April 2026. Sewa tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui menjadi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp 100.684.931,51 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 49.315.068,49
- Sewa Ruang Kantor milik Pemdes Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul untuk pelayanan Samsat Desa sebesar Rp 16.000.000,00 dengan masa sewa 1 Desember 2025 sampai dengan 30 November 2026. Sewa tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 telah diakui menjadi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp 1.358.904,11 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 14.641.095,89
- Sewa Ruang Kantor milik Pemdes Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul untuk pelayanan Samsat Desa sebesar Rp 11.862.900,00 dengan masa sewa 28 November 2025 sampai dengan 27 November 2026. Sewa tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui menjadi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp 1.105.037,26 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 10.757.862,74
- Sewa Ruang Kantor milik Pemdes Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo untuk Pelayanan Samsat Desa sebesar Rp 5.000.000,00 dengan masa sewa 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2026. Sewa tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah diakui menjadi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp 3.767.123,29 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 1.232.876,71.

Tabel III.50
Rincian Beban Dibayar Dimuka

No	Nama Asuransi	Tertanggung	Periode Pertanggungan		No. Polis	Premi (Rp)	Beban Dibayar Dimuka (Rp)		
1.	PT Asuransi Sinar Mas	PEMDA DIY	21/07/25	s/d	20/07/26	12.500.0014.17306	289.755.509,00	01/01/26 s.d. 21/07/26	160.357.843,34
						12.500.0014.17307			
2.	PT Asuransi Sinar Mas	PEMDA DIY	21/07/25	s/d	20/07/26	12.500.0014.18804	200.270.000,00	01/01/26 s.d. 20/07/26	110.834.356,16
3.	PT. Sawokembar Galeria	PEMDA DIY	01/05/25	s/d	30/04/26	05/SKG/PS/IV/2025	150.000.000,00	01/01/26 s.d. 30/04/26	49.315.068,49
4.	Sewa Pemdes Argomulyo	Pemdes Argomulyo	01/12/25	s/d	30/11/26	B/00.1.4.1/3681/B2.2	16.000.000,00	01/01/26 s.d. 30/11/26	14.641.095,89
5.	Sewa Pemdes Bangunharjo	Pemdes Bangunharjo	28/11/25	s/d	27/11/26	P/400.10.2.4/267	11.862.900,00	01/01/26 s.d. 27/11/26	10.757.862,74
6.	Sewa Pemdes Palihan	Pemdes Palihan	01/04/25	s/d	31/03/26	B/00.1.4.1/491/B2.4	5.000.000,00	01/01/26 s.d. 31/03/26	1.232.876,71
Jumlah (Rp)									347.139.103,34



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.4.1.7. Persediaan **Rp 2.636.894.934,13** **Rp 2.324.372.674,67**

Saldo Persediaan BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.636.894.934,13 terdiri dari Barang Pakai Habis dengan menyesuaikan klasifikasi persediaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan. Saldo Persediaan BPKA per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 312.522.259,46 atau 13,45% dari saldo Persediaan BPKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.324.372.674,67 dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.636.894.934,13 berasal dari saldo awal sebesar Rp 2.324.372.674,67 ditambah dengan belanja barang pakai habis pembentuk barang Persediaan sebesar Rp 4.486.530.209,44; ditambah dengan belanja pemeliharaan yang membentuk barang persediaan sebesar Rp 67.488.745,00; ditambah mutasi masuk sebesar Rp 16.343.611,44; ditambah belanja jasa yang membentuk barang persediaan sebesar Rp 6.924.000,00; dikurangi mutasi keluar Alat Kantor Lainnya berupa 230 buah Masker dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar (Rp 11.155.000,00); dikurangi (Rp 88.833.892,72) karena persediaan rusak; dan dikurangi (Rp 4.148.431.802,26) karena adanya penggunaan atau pemanfaatan persediaan. Adapun mutasi persediaan BPKA per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.51
Mutasi Persediaan

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo Akhir 31 Desember 2025
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Bahan	300.670.000,00	754.904.566,39	629.074.566,39	426.500.000,00
	Bahan Kimia	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-
	Bahan Bakar dan Pelumas	300.670.000,00	722.754.264,39	596.924.264,39	426.500.000,00
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	30.635.800,00	30.635.800,00	-
	Bahan Lainnya	-	464.502,00	464.502,00	-
2	Suku Cadang	-	253.555.862,61	253.555.862,61	-
	Suku Cadang Alat Angkutan	-	207.595.772,61	207.595.772,61	-
	Suku Cadang Alat Besar	-	45.960.090,00	45.960.090,00	-
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	2.023.702.674,67	3.552.482.525,44	3.365.790.265,98	2.210.394.934,13
	Alat Tulis Kantor	305.488.895,13	227.170.413,32	290.204.510,51	242.454.797,94
	Kertas dan Cover	248.810.638,70	181.354.383,68	202.299.382,95	227.865.639,43
	Bahan Cetak	552.061.736,33	2.025.953.788,44	1.648.159.327,32	929.856.197,45
	Benda Pos	2.620.000,00	14.925.000,00	16.045.000,00	1.500.000,00
	Bahan Komputer	759.054.688,89	920.885.884,00	993.221.236,70	686.719.336,19
	Perabot Kantor	14.994.913,60	74.468.459,00	77.194.673,78	12.268.698,82
	Alat Listrik	110.586.822,02	76.555.097,00	89.142.754,72	97.999.164,30
	Perlengkapan Dinas	315.000,00	-	225.000,00	90.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.769.980,00	2.719.500,00	20.848.380,00	11.641.100,00
	Natura	-	28.450.000,00	28.450.000,00	-
	JUMLAH (Rp)	2.324.372.674,67	4.560.942.954,44	4.248.420.694,98	2.636.894.934,13



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

2025 **2024 (audited)**

3.1.4.3. Investasi Jangka Panjang Rp 2.709.942.098.547,86 Rp 2.403.324.094.535,51

Investasi Jangka Panjang BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.709.942.098.547,86 mengalami kenaikan sebesar Rp 306.618.004.012,35 atau 12,76% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 2.403.324.094.535,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.52
Rincian Investasi Jangka Panjang

URAIAN	2025	2024
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	9.950.000.000,00	7.462.500.000,00
Dana Bergulir	9.950.000.000,00	7.462.500.000,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	2.699.992.098.547,86	2.395.861.594.535,51
Penyertaan Modal	2.699.992.098.547,86	2.395.861.594.535,51
JUMLAH (Rp)	2.709.942.098.547,86	2.403.324.094.535,51

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp 2.709.942.098.547,86 terdiri atas Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp 9.950.000.000,00 serta Investasi Jangka Panjang Permanen berupa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 2.698.802.098.547,86 dan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 1.190.000.000,00.

3.1.4.3.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp 9.950.000.000,00 Rp 7.462.500.000,00

• **Dana Bergulir**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp 9.950.000.000,00 merupakan Investasi sebesar Net Present Value (NPV) yang didapatkan dari saldo awal Dana Bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY per 31 Desember 2024 sebesar Rp 12.933.401.964,00 ditambah penyertaan modal BUKP Tahun 2025 sebesar Rp 2.500.000.000,00 dikurangi pelunasan sebesar (Rp 71.500.000,00) serta dikurangi penyisihan Dana Bergulir sebesar (Rp 5.411.901.964,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.53
Tabel Mutasi Dana Bergulir

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun	Nilai Pengguliran	Saldo 31-12-2024	Mutasi 2025		Saldo 31-12-2025	Penyisihan		Net Present Value	Keterangan
					Tambah	Kurang		%	Rp		
1	DPKP		20.229.417.900,00	1.866.650.000,00	-	71.500.000,00	1.795.150.000,00	-	1.795.150.000,00	-	
	DPM PHP Th 2011	2011	2.390.000.000,00	185.000.000,00	-	-	185.000.000,00	100%	185.000.000,00	-	Suku bunga 3%, Jangka waktu 1 th
	DPM PHP Th 2012	2012	3.400.000.000,00	241.000.000,00	-	500.000,00	240.500.000,00	100%	240.500.000,00	-	
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	94.500.000,00	-	5.000.000,00	89.500.000,00	100%	89.500.000,00	-	Suku bunga 3%, Jangka waktu 1 th
	DPM LUEP	2011	3.569.417.900,00	1.346.150.000,00	-	66.000.000,00	1.280.150.000,00	100%	1.280.150.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 th
2	Dinas Koperasi dan UKM		31.732.100.000,00	2.643.251.964,00	-	-	2.643.251.964,00	-	2.643.251.964,00	-	
	Prospek Mandiri Campus Entrepreneur 2009	2009	200.000.000,00	55.615.598,00	-	-	55.615.598,00	100%	55.615.598,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Perkuatan Permodalan bagi KUKS/UJKS Kop 2010	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010	2010	3.000.000.000,00	166.057.582,00	-	-	166.057.582,00	100%	166.057.582,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	92.422.098,00	-	-	92.422.098,00	100%	92.422.098,00	-	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 th



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun	Nilai Pengguliran	Saldo 31-12-2024	Mutasi 2025		Saldo 31-12-2025	Penyisihan		Net Present Value	Keterangan
					Tambah	Kurang		%	Rp		
	Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2006	2006	2.4292.500.000,00	567.715.775,00	-	-	567.715.775,00	100%	567.715.775,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 th
	Ketahanan Pangan 2007	2007	1.100.000.000,00	64.950.000,00	-	-	64.950.000,00	100%	64.950.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Prospek Mandiri 2007	2007	110.000.000,00	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2007	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	-	-	50.800.000,00	100%	50.800.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Prospek Mandiri 2008	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	100%	80.000.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Koperasi Karyawan 2008	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008	2008	630.000.000,00	165.734.227,00	-	-	165.734.227,00	100%	165.734.227,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Pemberdayaan Koperasi 2011	2011	2.500.000.000,00	239.912.400,00	-	-	239.912.400,00	100%	239.912.400,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011	2011	2.500.000.000,00	400.736.502,00	-	-	400.736.502,00	100%	400.736.502,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2012	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00	-	-	184.909.300,00	100%	184.909.300,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013	2013	4.200.000.000,00	86.560.178,00	-	-	86.560.178,00	100%	86.560.178,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016	2016	3.500.000.000,00	30.319.604,00	-	-	30.319.604,00	100%	30.319.604,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	158.863.500,00	-	-	158.863.500,00	100%	158.863.500,00	-	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	68.655.200,00	-	-	68.655.200,00	100%	68.655.200,00	-	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 th
3	BUKP		19.000.000.000,00	8.290.000.000,00	2.500.000.000,00	-	10.790.000.000,00		840.000.000,00	9.950.000.000,00	
	Tahun 2019	2019	10.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2020	2020	4.000.000.000,00	790.000.000,00	-	-	790.000.000,00	100%	790.000.000,00	-	-
	Tahun 2023	2023	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	5.000.000.000,00	0,50%	25.000.000,00	4.975.000.000,00	Jangka Waktu 3 Tahun
	Tahun 2024	2024	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-	2.500.000.000,00	0,50%	12.500.000,00	2.487.500.000,00	Jangka Waktu 3 Tahun
	Tahun 2025	2025	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	0,50%	12.500.000,00	2.487.500.000,00	Jangka Waktu 3 Tahun
4	Disloutkan		2.915.000.000,00	133.500.000,00	-	-	133.500.000,00		133.500.000,00	-	
	DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	-	-	133.500.000,00	100%	133.500.000,00	-	Suku bunga 3%, Jangka waktu 1 th
	JUMLAH		73.876.517.900,00	12.933.401.964,00	2.500.000.000,00	71.500.000,00	15.361.901.964,00		5.411.901.964,00	9.950.000.000,00	

3.1.4.3.2. Investasi Jangka Panjang Permanen **Rp 2.699.992.098.547,86** **Rp 2.395.861.594.535,51**

• **Penyertaan Modal**

Penyertaan Modal per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.699.992.098.547,86 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

- Ekuitas BUMD Tahun 2024 Bagian Pemda DIY sebesar Rp 2.397.051.217.653,20
- Ditambah pengakuan kerugian PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp 1.190.000.000,00
- Ditambah penyertaan modal kepada PT. Bank BPD DIY Tahun 2025 sebesar Rp 155.000.000.000,00
- Dikurangi deviden Tahun 2025 yang disetor ke BUD melalui Metode Ekuitas sebesar (Rp 127.241.046.476,91)
- Ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2025 Bagian Pemda DIY sebesar Rp 198.692.466.429,52
- Ditambah penyesuaian nilai ekuitas BUMD sebesar Rp 61.109.504.862,90
- Ditambah investasi BUKP bernilai negatif sebesar Rp 14.189.956.079,15



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Askrida
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.54
Tabel Mutasi Penyertaan Modal

No	Perusahaan Daerah	% Saham Pemda DIY	Penyertaan Modal 31-12-2024	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY	Mutasi Tahun Anggaran 2024				Penyertaan Modal 31-12-2025	
					Tambahan Modal Disetor Tahun 2025	Deviden Tahun 2024 yang disetor ke BUD Tahun 2025	% Saham Pemda DIY	Laba/Rugi BUMD Tahun 2025 Bagian Pemda DIY		Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD
METODE EKUITAS										
1	PT. Bank BPD DIY	52,000%	2.124.318.765.845,64	2.124.318.765.845,64	155.000.000.000,00	121.074.128.133,00	53,840%	182.157.867.234,55	63.676.887.653,26	2.404.079.392.600,45
2	PT. AMI	99,990%	43.384.353.348,78	43.384.353.348,78	-	2.719.068.430,00	99,970%	7.647.139.580,68	(1.979.193.133,11)	46.333.231.366,35
3	PD.Tarumartani	99,990%	45.322.454.221,31	45.322.454.221,31	-	-	99,990%	10.446.695.764,95	(1,01)	55.769.149.985,25
4	BUKP		38.124.076.310,82	40.503.699.428,51	-	3.447.849.913,91		1.134.195.655,43	(588.189.656,25)	51.791.811.592,93
5	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY	100,00%	143.521.944.808,97	143.521.944.808,97	-		100,00%	(2.693.431.806,09)	-	140.828.513.002,88
METODE HARGA PEROLEHAN										
6	PT. ABA	0,373%	1.190.000.000,00		-		0,373%			1.190.000.000,00
JUMLAH			2.395.861.594.535,52	2.397.051.217.653,20	155.000.000.000,00	127.241.046.476,91		198.692.466.429,52	61.109.504.862,90	2.699.992.098.547,86

Perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Taru Martani, dan BUKP menggunakan Metode Ekuitas sedangkan penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan Metode Harga Perolehan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal pada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp 2.404.079.392.600,45. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Bank BPD DIY per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2024 $52,000\% \times \text{Rp } 4.085.228.395.857,00$ Rp 2.124.318.765.845,64
- Tambahan Modal Disetor Rp 155.000.000.000,00
- Deviden Tahun 2024 yang Disetor ke Pemda DIY Tahun 2025 (Rp 121.074.128.133,00)
- Laba/Rugi Tahun 2025 Rp 338.331.848.504,00
- Laba/Rugi Tahun 2025 Bagian Pemda DIY $53,840\% \times \text{Rp } 338.331.848.504,00$ Rp 182.157.867.234,55
- Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD Rp 63.676.887.653,26
- Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2025 **Rp 2.404.079.392.600,45**

b. Penyertaan Modal pada PT. Aninda Mitra Internasional sebesar Rp 46.333.231.366,35. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2024 $99,990\% \times \text{Rp } 43.388.692.218,00$ Rp 43.384.353.348,78
- Deviden Tahun 2024 yang Disetor ke Pemda DIY Tahun 2025 (Rp 2.719.068.430,00)
- Laba/Rugi Tahun 2025 Rp 7.649.434.411,00
- Laba/Rugi Tahun 2025 Bagian Pemda DIY $99,970\% \times \text{Rp } 7.649.434.411,00$ Rp 7.647.139.580,68
- Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD (Rp 1.979.193.133,11)
- Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2025 **Rp 46.333.231.366,35**



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

c. Penyertaan Modal pada PT. Taru Martani sebesar Rp 55.769.149.985,25. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Taru Martani per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2024	99,990% x Rp 45.326.986.920,00	Rp 45.322.454.221,31
• Deviden Tahun 2024 yang Disetor ke Pemda DIY Tahun 2025		Rp -
• Laba/Rugi Tahun 2025	Rp 10.447.740.539,00	
• Laba/Rugi Tahun 2025 Bagian Pemda DIY	99,990% x Rp 10.447.740.539,00	Rp 10.446.695.764,95
• Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		(Rp 1,01)
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2025		Rp 55.769.149.985,25

d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sebesar Rp 51.791.811.592,93. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY		Rp 38.124.076.310,82
• Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2024		Rp 2.379.623.117,68
• Deviden Tahun 2024 yang Disetor ke Pemda DIY Tahun 2025		(Rp 3.447.849.913,91)
• Laba/Rugi Tahun 2025	Rp 875.981.062,00	
• Laba/Rugi Tahun 2025 Bagian Pemda DIY		Rp 1.134.195.655,43
• Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		(Rp 588.189.656,25)
• Investasi Bernilai Negatif		Rp 14.189.956.079,15
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2025		Rp 51.791.811.592,93

e. Penyertaan Modal pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sebesar Rp 140.828.513.002,88. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2024	100,00% x Rp 143.521.944.808,97	Rp 143.521.944.808,97
• Laba/Rugi Tahun 2025	(Rp 2.693.431.806,09)	
• Laba/Rugi Tahun 2025 Bagian Pemda DIY	100,00% x (Rp 2.693.431.806,09)	(Rp 2.693.431.806,09)
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2025		Rp 140.828.513.002,88

f. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp 1.190.000.000,00 adalah modal disetor sebesar 0,373% dari seluruh Modal PT. Asuransi Bangun Askrida. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode perolehan dengan perhitungan sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2025		Rp 1.190.000.000,00
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2025		Rp 1.190.000.000,00

Pada Tahun 2025 tidak terdapat penambahan modal disetor sehingga saldo penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.190.000.000,00 sesuai dengan saldo terakhir pada tahun anggaran 2024.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආයතන විභාගනායක කමිටුව පාලන කාර්යාලය
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

	2025	2024 (audited)
3.1.4.2. Aset Tetap	<u>Rp 763.380.752.459,15</u>	<u>Rp 751.452.336.858,57</u>

Aset Tetap BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 763.380.752.459,15 merupakan nilai buku Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp 915.019.640.607,24 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp 151.638.888.148,09). Aset Tetap BPKA per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.928.415.600,58 atau 1,59% dibandingkan dengan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 751.452.336.858,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.55
Rincian Aset Tetap

No.	URAIAN	2024	2023
1	Tanah	598.451.276.690,00	595.379.993.370,00
2	Peralatan dan Mesin	101.356.033.103,30	100.192.407.845,40
3	Gedung dan Bangunan	198.551.114.559,93	178.069.740.402,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.016.338.850,00	20.686.509.539,47
5	Aset Tetap Lainnya	243.560.204,01	2.311.964.727,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	401.317.200,00	1.248.065.182,00
	JUMLAH (Rp)	915.019.640.607,24	897.888.681.065,87
7	Akumulasi Penyusutan	(151.638.888.148,09)	(146.436.344.207,30)
	JUMLAH (Rp)	(151.638.888.148,09)	(146.436.344.207,30)
	Nilai Buku Aset Tetap	763.380.752.459,15	751.452.336.858,57

3.1.4.2.1. Tanah	<u>Rp 598.451.276.690,00</u>	<u>Rp 595.379.993.370,00</u>
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Saldo Tanah BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 598.451.276.690,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.071.283.320,00 atau 0,52% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 595.379.993.370,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Mutasi (bertambah) Tanah sebesar Rp 188.510.229.828,00 berasal dari:**
 - Hibah masuk sebesar Rp 188.510.229.828,00 dengan rincian:
 - Hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebesar Rp 9.976.170.000,00
 - Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 178.534.059.828,00
- **Mutasi (berkurang) Tanah sebesar (Rp 185.438.946.508,00) berasal dari:**
 - Mutasi keluar ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar (Rp 178.534.059.828,00)
 - Usulan Penghapusan sebesar (Rp 6.904.886.680,00)

Tabel III.56
Rincian Mutasi Tanah

TANAH	
SALDO AWAL	595.379.993.370,00
Penambahan:	
Hibah Masuk dari Eksternal	188.510.229.828,00
JUMLAH (Rp)	188.510.229.828,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Republik Indonesia

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

TANAH	
Pengurangan:	
Mutasi Keluar ke Eksternal	(178.534.059.828,00)
Usulan Penghapusan	(6.904.886.680,00)
JUMLAH (Rp)	(185.438.946.508,00)
SALDO AKHIR	598.451.276.690,00

Tabel III.57
Rincian Tanah

No	URAIAN	2024	2023
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	18.543.308.540,00	8.567.138.540,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	145.873.507.080,00	145.873.507.080,00
3	Tanah untuk Bangunan Industri	1.261.546.000,00	1.261.546.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	399.301.823.070,00	406.206.709.750,00
5	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	675.100.000,00	675.100.000,00
6	Tanah Pertanian	279.542.000,00	279.542.000,00
7	Tanah Lapangan Olahraga	32.516.450.000,00	32.516.450.000,00
JUMLAH (Rp)		598.451.276.690,00	595.379.993.370,00

3.1.4.2 Peralatan dan Mesin **Rp 101.356.033.103,30** **Rp 100.192.407.845,40**

Saldo Peralatan dan Mesin BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 101.356.033.103,30 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.163.625.257,90 atau 1,16% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 100.192.407.845,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.58
Rincian Peralatan dan Mesin

No.	URAIAN	2024	2023
1	Alat Besar	16.807.526.657,00	15.032.414.037,00
2	Alat Angkutan	11.719.378.740,00	11.121.930.700,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	161.394.925,00	1.388.695.695,00
4	Alat Pertanian	53.313.000,00	178.665.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.757.291.250,31	44.834.084.281,41
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.222.158.507,14	5.388.896.550,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	58.100.000,00	126.479.760,00
8	Alat Laboratorium	1.111.885.000,00	979.390.090,00
9	Alat Peralengkapan	21.000.000,00	71.440.500,00
10	Komputer	20.697.526.023,85	20.274.822.351,99
11	Alat Eksplorasi	67.815.000,00	-
12	Alat Keselamatan Kerja	34.288.000,00	121.137.110,00
13	Peralatan Proses/Produksi	0,00	771.570,00
14	Rambu-Rambu	545.261.000,00	589.285.200,00
15	Peralatan Olahraga	99.095.000,00	84.395.000,00
JUMLAH		101.356.033.103,30	100.192.407.845,40

- **Mutasi (bertambah) Peralatan dan Mesin sebesar Rp 10.839.182.021,44 berasal dari:**
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 628.539.055,00
 - Hibah masuk sebesar Rp 5.727.947.514,54 dengan rincian:
 - Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebesar Rp 5.482.379.514,54
 - Hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebesar Rp 245.568.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘතිමයවිකල්පකළමනාකරණය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- Mutasi masuk sebesar Rp 4.935.482.126,90 dengan rincian:
 - Mutasi masuk Mutasi Masuk dari Dinas Pariwisata sebesar Rp 2.820.877.086,90
 - Mutasi Masuk dari Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.803.105.000,00
 - Mutasi Masuk dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp 262.500.040,00
 - Mutasi Masuk dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 49.000.000,00
 - Reklasifikasi dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp 87.461.860,00
 - Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 66.474.000,00
 - Gabung Aset sebesar Rp 21.816.520,00
- **Mutasi (berkurang) Peralatan dan Mesin sebesar (Rp 10.304.095.818,54) berasal dari:**
 - Mutasi keluar sebesar (Rp 7.466.352.914,54) dengan rincian:
 - Mutasi Keluar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp 332.219.200,00)
 - Mutasi Keluar ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar (Rp 594.180.000,00)
 - Mutasi Keluar ke Dinas Perindustrian sebesar (Rp 53.730.000,00)
 - Mutasi Keluar ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar (Rp 5.616.704.514,54)
 - Mutasi Keluar ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sebesar (Rp 53.730.000,00)
 - Mutasi Keluar ke Dinas Perhubungan sebesar (Rp 251.624.200,00)
 - Mutasi Keluar ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar (Rp 161.190.000,00)
 - Mutasi Keluar ke Sekretariat DPRD sebesar (Rp 268.650.000,00)
 - Mutasi Keluar ke Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar (Rp 134.325.000,00)
 - Koreksi Kode Barang Aset sebesar (Rp 1.036.505.682,00)
 - Usulan Penghapusan sebesar (Rp 1.801.237.222,00)

Tabel III.59
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

PERALATAN DAN MESIN	
SALDO AWAL	100.192.407.845,40
Penambahan:	
Belanja Modal	628.539.055,00
Hibah Masuk dari Eksternal	5.727.947.514,54
Mutasi Masuk dari Eksternal	4.935.482.126,90
Reklasifikasi dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga	87.461.860,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	66.474.000,00
Gabung Aset	21.816.520,00
JUMLAH (Rp)	10.839.182.021,44
Pengurangan:	
Mutasi Keluar ke Eksternal	(7.466.352.914,54)
Koreksi Kode Barang Aset	(1.036.505.682,00)
Usulan Penghapusan	(1.801.237.222,00)
JUMLAH (Rp)	(10.304.095.818,54)
SALDO AKHIR	101.356.033.103,30



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.4.2.3. Gedung dan Bangunan **Rp 198.551.114.559,93** **Rp 178.069.740.402,00**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 198.551.114.559,93 mengalami kenaikan sebesar Rp 20.481.374.157,93 atau 11,50% dibandingkan dengan saldo Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp 178.069.740.402,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel III.60
Rincian Gedung dan Bangunan

No.	URAIAN	2025	2024
1	Bangunan Gedung	196.512.685.467,93	175.468.250.614,00
2	Monumen	-	463.759.190,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.038.429.092,00	2.137.730.598,00
JUMLAH (Rp)		198.551.114.559,93	178.069.740.402,00

- **Mutasi (bertambah) Gedung dan Bangunan sebesar Rp 44.271.461.166,27 berasal dari:**
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 382.390.500,00
 - Mutasi masuk sebesar Rp 24.084.488.323,93 dengan rincian:
 - Mutasi masuk dari Dinas Perdagangan sebesar Rp 27.000.000,00
 - Mutasi masuk dari Dinas Pariwisata sebesar Rp 22.381.331.311,93
 - Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp 1.676.157.012,00
 - Hibah masuk sebesar Rp 18.953.638.208,34 dengan rincian:
 - Hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebesar Rp 954.491.000,00
 - Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 51.426.048,00
 - Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebesar Rp 17.947.721.160,34
 - Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 196.828.952,00
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 179.263.000,00
 - Koreksi kode barang masuk sebesar Rp 857.242.682,00
- **Mutasi (berkurang) Gedung dan Bangunan sebesar (Rp 24.172.477.508,34) yang berasal dari:**
 - Mutasi keluar ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar (Rp 17.947.721.160,34)
 - Usulan Penghapusan sebesar (Rp 6.112.456.348,00)
 - Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar (Rp 106.000.000,00)
 - Aset ekstrakomtabel sebesar (Rp 6.300.000,00)

Tabel III.61
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

GEDUNG DAN BANGUNAN	
SALDO AWAL	178.069.740.402,00
Penambahan:	
Belanja Modal	382.390.500,00
Mutasi Masuk dari Eksternal	24.084.488.323,93
Hibah Masuk	18.953.638.208,34
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi	196.828.952,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආයතන විභාගනායක සේවා ආයතන කළමනාකරු

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

GEDUNG DAN BANGUNAN	
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	179.263.000,00
Koreksi Kode Barang Masuk	857.242.682,00
JUMLAH (Rp)	44.271.461.166,27
Mutasi Keluar ke Eksternal	(17.947.721.160,34)
Usulan Penghapusan	(6.112.456.348,00)
Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(106.000.000,00)
Aset Ekstrakomtabel	(6.300.000,00)
JUMLAH (Rp)	24.172.477.508,34
SALDO AKHIR	198.551.114.559,93

3.1.4.2.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 16.016.338.850,00 Rp 20.686.509.539,47

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 16.016.338.850,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 4.670.170.689,47) atau (22,58%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 20.686.509.539,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.62
Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	URAIAN	2025	2024
1	Jalan dan Jembatan	9.488.496.762,00	9.357.996.762,00
2	Bangunan Air	2.548.651.638,00	2.548.651.639,00
3	Instalasi	590.233.250,00	587.574.250,00
4	Jaringan	3.388.957.200,00	3.388.957.200,00
	JUMLAH (Rp)	16.016.338.850,00	20.686.509.539,47

- **Mutasi (bertambah) Jalan, Jaringan, dan Irigasi BPKA sebesar Rp 164.129.177.607,12 berasal dari:**
 - Mutasi masuk sebesar Rp 418.171.745,00 dengan rincian:
 - Mutasi masuk dari Rumah Sakit Paru Respira sebesar Rp 96.905.000,00
 - Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp 318.607.745,00
 - Hibah masuk dari Kementerian Pekerjaan Umum RI sebesar Rp 163.505.081.910,12
 - Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp 106.000.000,00
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 99.923.952,00

- **Mutasi (berkurang) Jalan, Jaringan, dan Irigasi BPKA sebesar (Rp 168.799.348.296,59) berasal dari:**
 - Mutasi keluar ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar (Rp 163.505.081.910,12)
 - Usulan Penghapusan sebesar (Rp 5.095.321.594,47)
 - Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar (Rp 196.828.952,00)
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp 2.115.840,00)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.63
Rincian Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi

JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	
SALDO AWAL	20.686.509.539,47
Penambahan:	
Mutasi Masuk dari Eksternal	418.171.745,00
Hibah Masuk	163.505.081.910,12
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	106.000.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	99.923.952,00
JUMLAH (Rp)	164.129.177.607,12
Pengurangan:	
Mutasi Keluar ke Eksternal	(163.505.081.910,12)
Usulan Penghapusan	(5.095.321.594,47)
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(196.828.952,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(2.115.840,00)
JUMLAH (Rp)	(168.799.348.296,59)
SALDO AKHIR	16.016.338.850,00

	2025	2024 (audited)
3.1.4.4. Aset Tetap Lainnya	Rp 243.560.204,01	Rp 2.311.964.727,00

Saldo Aset Tetap Lainnya BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 243.560.204,01 mengalami penurunan sebesar (Rp 2.068.404.522,99) atau (89,47%) dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp 2.311.964.727,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.64
Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	URAIAN	2025	2024
1	Bahan Perpustakaan	216.950.690,00	217.633.100,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	11.759.514,01	2.864.480,00
3	Tanaman	14.850.000,00	14.850.000,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	2.076.617.147,00
JUMLAH (Rp)		243.560.204,01	2.311.964.727,00

- **Mutasi (bertambah) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 175.084.039.248,01 berasal dari:**
 - Hibah masuk sebesar Rp 174.893.312.713,00 dengan rincian:
 - Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum RI sebesar Rp 174.793.388.761,00
 - Hibah dari Badan Pengawas Umum sebesar Rp 99.923.952,00
 - Mutasi masuk dari Dinas Pariwisata DIY sebesar Rp 9.347.695,01
 - Koreksi Kode Barang sebesar Rp 179.263.000,00
 - Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 2.115.840,00
- **Mutasi (berkurang) Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp 177.152.443.771,00) berasal dari:**
 - Mutasi keluar ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar (Rp 175.469.341.443,00)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආකෘතියක් ලෙස පාලනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්ෂික වාර්තාවක්

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- Usulan Penghapusan sebesar (Rp 1.401.117.126,00)
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar (Rp 179.263.000,00)
- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar (Rp 99.923.952,00)
- Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar (Rp 2.798.250,00)

Tabel III.65
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

ASET TETAP LAINNYA	
SALDO AWAL	2.311.964.727,00
Penambahan:	
Hibah Masuk dari Eksternal	174.893.312.713,00
Mutasi Masuk dari Eksternal	9.347.695,01
Koreksi Kode Barang	179.263.000,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.115.840,00
JUMLAH (Rp)	175.084.039.248,01
Pengurangan:	
Mutasi Keluar ke Eksternal	(175.469.341.443,00)
Usulan Penghapusan	(1.401.117.126,00)
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(179.263.000,00)
Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(99.923.952,00)
Reklasifikasi ke Properti Investasi	(2.798.250,00)
JUMLAH (Rp)	(177.152.443.771,00)
SALDO AKHIR	243.560.204,01

3.1.4.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 401.317.200,00 Rp 1.248.065.182,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 401.317.200,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 846.747.982,00) atau (67,84%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 1.248.065.182 diakibatkan adanya usulan penghapusan untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp 846.747.982,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.66
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
SALDO AWAL	1.248.065.182,00
Pengurangan:	
Usulan Penghapusan	(846.747.982,00)
JUMLAH (Rp)	(846.747.982,00)
SALDO AKHIR	401.317.200,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආකාර විගණකවල විවෘත වාර්තා කොටසක්

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.4.6. Akumulasi Penyusutan (Rp 151.638.888.148,09) (Rp 146.436.344.207,30)

Saldo Akumulasi Penyusutan BPKA per 31 Desember 2025 sebesar (Rp 151.638.888.148,09) merupakan saldo akumulasi penyusutan untuk Aset Tetap. Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar (Rp 5.202.543.940,79) atau 3,55% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.67
Rincian Akumulasi Penyusutan**

No.	URAIAN	2025	2024
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(96.346.391.097,07)	(93.829.129.780,49)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(45.083.456.765,79)	(39.660.616.048,83)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(10.209.040.285,23)	(12.946.598.377,98)
JUMLAH (Rp)		(151.638.888.148,09)	(146.436.344.207,30)

3.1.4.4. Aset Lainnya (Rp 47.089.974.294,48) (Rp 45.619.618.297,38)

Aset Lainnya meliputi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain berupa Aset Rusak Berat/Usang dan Aset yang Tidak Dapat Digunakan dalam Operasional Pemerintah, serta Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF). Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 47.089.974.294,48 merupakan nilai buku Aset Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp 57.256.489.512,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp 10.166.515.217,52) ditambah dengan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp 0,00 karena belum ada KMK tentang Treasury Deposit Facility. Saldo Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp 1.470.355.997,10 atau 3,22% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 45.619.618.297,38 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.68
Rincian Aset Lainnya**

No.	URAIAN	2025
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
1	Sewa	40.017.859.425,00
2	Kerja Sama Pemanfaatan	7.427.190.000,00
3	Akumulasi Penyusutan Sewa	(2.105.066.646,05)
4	Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan	(7.028.190.000,00)
Aset Tidak Berwujud		
1	Software	277.406.000,00
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.268.023.895,00
3	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-
Aset Lain-Lain		
1	Aset Rusak Berat/Usang	240.438.935,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	4.025.571.257,00
3	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(189.384.068,24)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(843.874.503,23)
TOTAL (Rp) Aset Lainnya		47.089.974.294,48



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.4.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp 47.445.049.425,00 Rp 46.656.511.285,00

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 47.445.049.425,00 mengalami kenaikan sebesar (Rp 788.538.140,00) atau 1,69% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 46.656.511.285,00. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi Sewa sebesar Rp 40.017.859.425,00 dan Kerja Sama Pemanfaatan sebesar Rp 7.427.190.000,00.

Tabel III.69
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	URAIAN	2025	2024
1	Sewa	40.017.859.425,00	38.947.241.285,00
2	Kerja Sama Pemanfaatan	7.427.190.000,00	7.709.270.000,00
JUMLAH (Rp) Netto		47.445.049.425,00	46.656.511.285,00

Kenaikan nilai saldo akhir Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Mutasi (bertambah) Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp 876.000.000,00 berasal dari:**
 - Mutasi masuk sebesar Rp 313.000.000,00 yang berasal dari:
 - Mutasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY sebesar Rp 3.000.000,00
 - Mutasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY sebesar Rp 310.000.000,00
 - Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel sebesar Rp 563.000.000,00
- **Mutasi (berkurang) Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar (Rp 87.461.860,00) berasal dari:**
 - Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp 87.461.860,00

3.1.4.4.2. Aset Tidak Berwujud Rp 5.545.429.895,00 Rp 6.941.667.895,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tidak Berwujud adalah *software*, *website*, *lisensi*, *franchise*, hak cipta, paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, serta DED. Saldo Aset Tak Berwujud BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.545.429.895,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 1.396.238.000,00) atau (20,11%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 6.941.667.895,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.70
Rincian Aset Tidak Berwujud

No.	URAIAN	2025	2024
1	Software	277.406.000,00	257.406.000,00
2	Kajian	-	1.124.216.000,00
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.268.023.895,00	5.560.045.895,00
JUMLAH (Rp)		5.545.429.895,00	6.941.667.895,00

Penurunan nilai saldo akhir Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Mutasi (bertambah) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 86.590.000,00 berasal dari:**
 - Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp 66.590.000,00
 - Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 20.000.000,00
- **Mutasi (berkurang) Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp 1.482.828.000,00) berasal dari:**
 - Usulan Penghapusan sebesar (Rp 1.482.828.000,00)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.4.4.3. Aset Lain-Lain Rp 4.266.010.192,00 Rp 1.231.753.806,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan akan dihapus dalam kondisi rusak berat. Saldo Aset Lain-Lain BPKA sebesar Rp 4.266.010.192,00 merupakan saldo akhir Aset Lain-Lain berupa Aset Rusak Berat/Usang dengan nilai perolehan sebesar Rp 240.438.935,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang sebesar (Rp 189.384.068,24) sehingga nilai buku Aset Rusak Berat/Usang adalah sebesar Rp 51.054.866,76. Selain itu, terdapat juga Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp 4.025.571.257,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar (Rp 843.874.503,23) sehingga nilai buku Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah adalah sebesar Rp 3.181.696.753,77.

Saldo Aset Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.034.256.386,00 atau 246,34% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 1.231.753.806,00. Kenaikan nilai saldo akhir Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Mutasi (bertambah) Aset Lain-Lain sebesar Rp 23.644.594.952,47 berasal dari:**
 - Usulan Penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 8.706.123.902,00
 - Usulan Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 6.112.456.348,00
 - Usulan Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 5.095.321.594,47
 - Usulan Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 1.401.117.126,00
 - Usulan Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 846.747.982,00
 - Usulan Penghapusan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 1.482.828.000,00
- **Mutasi (bertambah) Aset Lain-Lain sebesar (Rp 20.610.338.566,47) berasal dari:**
 - Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp 66.590.000,00)
 - Penghapusan sebesar (Rp 20.543.748.566,47)

3.1.4.5. Properti Investasi Rp 132.304.042.221,16 Rp 136.193.984.070,90

Properti Investasi adalah aset berupa tanah, bangunan, atau bagian dari suatu bangunan yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa dengan tujuan utama untuk mendapatkan kenaikan nilai aset di masa depan (*capital appreciation*). Properti Investasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 132.304.042.221,16 merupakan nilai perolehan untuk Properti Investasi Tanah sebesar Rp 58.988.583.440,00 dan Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp 111.237.854.850,00. Nilai ini mencerminkan harga pembelian awal atau biaya pembangunan tanah dan gedung sebelum dikurangi dengan depresiasi. Namun, seiring berjalannya waktu dan penggunaan aset, BPKA DIY mencatat adanya Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp 37.922.396.068,84). Dengan demikian, *Net Book Value* yang kini tercermin dalam Neraca adalah sebesar Rp 94.381.646.152,32. Angka ini merepresentasikan sisa manfaat ekonomi dari gedung yang masih bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Saldo Properti Investasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp 3.889.941.849,74) atau (2,86%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 136.193.984.070,90.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

2025 **2024 (audited)**

3.1.6. Kewajiban **Rp 6.897.662.687,33** **Rp 46.945.778.298,74**

Kewajiban BPKA per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 6.897.662.687,33 merupakan Kewajiban Jangka Pendek berupa Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp 6.659.258.645,33; Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 215.594.253,00; serta Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 22.809.789,00. Rincian kewajiban BPKA per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.71
Rincian Kewajiban per Unit Kerja

No.	URAIAN	2025	2024
1	Pendapatan Diterima Dimuka	6.659.258.645,33	3.596.516.965,74
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	215.594.253,00	201.256.813,00
3	Utang Belanja Bagi Hasil	22.809.789,00	43.148.004.520,00
JUMLAH (Rp)		6.897.662.687,33	46.945.778.298,74

3.1.6.1. Pendapatan Diterima Dimuka **Rp 6.659.258.645,33** **Rp 3.596.516.965,74**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2025 belum dikonsumsi/dimanfaatkan oleh pihak tersebut. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut berasal dari BPKA (induk) sebesar Rp 6.623.413.817,86; KPPD Bantul sebesar Rp 3.498.083,24; dan KPPD Kulon Progo sebesar Rp 32.346.744,23 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.72
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA (Induk)

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025	
							Periode	Nilai
1	Bangunan	eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD DIY	8/PERJ/GUB/VIII/2022	01/07/2022 s/d 30/06/2027	990.000.000,00	01/01/2026 s/d 30/06/2026	296.024.096,39
2	Tanah	Dlaban, Sentolo, Kulon Progo	PT. Selo Adi Karto	5/PERJ/GUB/IX/2024	01/04/2024 s/d 31/03/2026	249.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/03/2025	30.698.630,14
3	Tanah dan Bangunan	Eks Diklat Perindustrian, Malangan Ring Road Selatan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun	00.10.7/8750	23/10/2025 s/d 22/10/2026	67.704.000,00	01/01/2025 s/d 22/10/2025	54.719.671,23
4	Tanah	Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32 Yk	BUKP Gondokusuman	49/PR/SEKDA/VIII/2024	01/03/2024 s/d 28/02/2027	51.000.000,00	01/01/2026 s/d 28/02/2026	19.747.945,21
5	Tanah dan Bangunan	Jalan Wisata Babarsari, Sleman	Yayasan Perguruan Dharma Pala	1/PERJ/SEKDA/I/2022 07/01/2022	20/11/2021 s/d 19/11/2026	45.200.000,00	01/01/2026 s/d 19/11/2026	7.995.399,78
6	Tanah	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	16/PERJ/SEKDA/III/2024	28/03/2025 s/d 27/03/2026	Rp18.480.000,00	01/01/2026 s/d 27/03/2026	4.354.191,78
7	Tanah	D.I. Panjaitan No. 66 Mantrijeron	dr. Soedarman	10/PERJ/GUB/VII/2023	03/09/2023 s/d 02/09/2028	188.125.000,00	01/01/2026 s/d 02/09/2026	100.498.084,29
8	Tanah	Jl. Perwakilan Wates	KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo	B/00.10.7/8471/B2	21/02/2025 s/d 20/02/2026	Rp7.332.000,00	01/01/2026 s/d 20/02/2026	1.024.471,23
9	Tanah	Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Gapoktan Tirta	66/PERJ/SEKDA/XI/2024	01/08/2024 s/d 31/07/2029	25.000.000,00	01/01/2026 s/d 31/07/2026	17.907.995,62
10	Tanah	Kawasan Jogja Expo Center (JEC)	PT. Surya Abhinaya Sentosa	3/PERJ/GUB/V/2024	01/01/2024 s/d 31/12/2028	1.770.000.000,00	01/01/2026 s/d 31/12/2026	1.061.806.239,74



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025	
							Periode	Nilai
11	Tanah	Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Pemerintah Kalurahan Widodomartani	27/PERJ/SEKDA/X/2021 11/10/2021	01/09/2021 s/d 31/08/2026	24.000.000,00	01/01/2026 s/d 31/08/2026	3.193.866,37
12	Tanah	Jalan Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	PT. Daya Armada Nusantara	5/PERJ/GUB/IV/2022	25/03/2022 s/d 24/03/2027	143.500.000,00	01/01/2026 s/d 24/03/2026	35.207.009,86
13	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Aris Purnomo	proses	01/09/2025 s/d 31/08/2028	6.300.000,00	01/01/2026 s/d 31/08/2026	5.598.722,63
14	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Sumartiningsih	proses	01/09/2025 s/d 31/08/2028	12.600.000,00	01/01/2026 s/d 31/08/2026	11.197.445,26
15	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Roos Ani	proses	01/09/2025 s/d 31/08/2028	8.190.000,00	01/01/2026 s/d 31/08/2026	7.278.339,42
16	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Hermawan	proses	01/09/2025 s/d 31/08/2026	3.500.000,00	01/01/2026 s/d 31/08/2026	2.330.136,99
17	Tanah dan Bangunan	Karangjati, Mlati, Sleman	Adimas Nugroho	proses	01/09/2025 s/d 31/08/2026	4.750.000,00	01/01/2026 s/d 31/08/2026	3.162.328,77
18	Tanah	Yogyakarta	PT. Avo Innovation Technology	B/00.10.7/6751/B2	01/05/2025 s/d 30/04/2026	16.150.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	5.309.589,04
19	Tanah	Tambak Udang di Gadingsari, Sanden	YB Pratomo	10/PERJ/SEKDA/I/2022	01/02/2022 s/d 31/01/2027	115.000.000,00	01/01/2026 s/d 31/01/2026	24.939.759,04
20	Tanah	Sorok, Sumbermulyo	Muhyudi Prabowo	6/PERJ/SEKDA/II/2024	01/01/2024 s/d 31/12/2028	8.250.000,00	01/01/2026 s/d 31/12/2026	4.949.096,88
21	Tanah	Yogyakarta	Widodo Mulyo	proses	01/10/2024 s/d 30/09/2030	8.000.000,00	01/01/2026 s/d 31/08/2026	7.596.933,19
22	Tanah dan Bangunan	Jalan D.I. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	7/PERJ/GUB/VIII/2021	01/04/2021 s/d 30/09/2026	126.000.000,00	01/01/2026 s/d 30/09/2026	17.121.951,22
23	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Depri Priatna	9/PERJ/SEKDA/IV/2023	01/10/2022 s/d 30/09/2027	39.500.000,00	01/01/2026 s/d 30/09/2026	13.801.204,82
24	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Yani Suryani	proses	01/10/2025 s/d 30/09/2026	5.500.000,00	01/01/2026 s/d 30/09/2026	4.113.698,63
25	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Juju	proses	01/10/2025 s/d 30/09/2026	4.500.000,00	01/01/2026 s/d 30/09/2026	3.365.753,42
26	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Zuljasrifon	8/PERJ/SEKDA/I/2022	01/10/2021 s/d 30/09/2026	22.500.000,00	01/01/2026 s/d 30/09/2026	3.363.910,19
27	Tanah	Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kab. Sleman	Pemerintah Kalurahan Sumberagung	19/PERJ/SEKDA/IV/2022	01/03/2022 s/d 28/02/2027	31.725.000,00	01/01/2026 s/d 28/02/2026	7.366.593,65
28	Tanah	Hargobinangun, Pakem, Sleman	PT. Anindya Mitra Internasional	3/PERJ/GUB/III/2023	27/03/2021 s/d 26/03/2028	320.000.000,00	01/01/2026 s/d 26/03/2026	142.922.824,30
29	Tanah dan Bangunan	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Erselita Rachma Sari	B/00.10.7/10060/B2	01/05/2025 s/d 30/04/2026	3.605.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	1.185.205,48
30	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Sedioko	21/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	560.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	372.924,42
31	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Sulistyaningsih	22/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	1.305.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	869.047,10
32	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Tri Jalu Suryowaseso	23/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	1.580.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	1.052.179,63
33	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Aries Nuzuli	24/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	895.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	596.013,14
34	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Ir. Subur Raharjo	47/PERJ/SEKDA/VII/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	6.250.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	4.162.102,96
35	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Ignatia Sumartinah	26/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	67.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	44.617,74
36	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Sri Widiastuti	27/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	560.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	372.924,42
37	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Yulianto Wibowo	28/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	560.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	372.924,42
38	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Sugiarto	29/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	140.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	93.231,11
39	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Suyatini	30/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	140.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	93.231,11



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025	
							Periode	Nilai
40	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	RL Mawarti Dwi Astuti DR.	31/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	1.150.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	765.826,94
41	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Supartini	32/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	535.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	356.276,01
42	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Bambang Setyo Pambudi	33/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	280.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	46.027,40
43	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Toni Aris Munandar	35/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	195.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	129.857,61
44	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Wisnubroto	36/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	280.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	186.462,21
45	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Hari Murti	37/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	280.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	186.462,21
46	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Bayu Muliawan	38/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	280.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	186.462,21
47	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Siti Dahliah	39/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	1.090.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	725.870,76
48	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Iwan Supriyadi	40/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	1.310.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	872.376,78
49	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Gunarto	41/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	1.345.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	895.684,56
50	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Dwi Ariyanto	42/PERJ/SEKDA/V/2024	01/05/2025 s/d 30/04/2029	1.695.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	1.128.762,32
51	Tanah dan Bangunan	Rumah Tinggal	Anton Rudianto	B/00.10.7/10060/B2	01/05/2025 s/d 30/04/2029	1.850.000,00	01/01/2026 s/d 30/04/2026	608.219,18
52	Tanah dan Bangunan	Jalan Sriti Nomor 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta	67/PERJ/SEKDA/IX/2024	01/06/2024 s/d 31/05/2027	12.000.000,00	01/01/2026 s/d 31/05/2026	5.654.794,52
53	Tanah dan Bangunan	Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala Darma Saputra	proses	31/07/2025 s/d 30/07/2026	23.600.000,00	01/01/2026 s/d 30/07/2026	13.642.739,73
54	Tanah	Jalan Taman Siswa Nomor 103 Yogyakarta	PT. Yudhistira Mahadana Sampurna	proses	01/01/2026 s/d 31/12/2026	190.000.000,00	01/01/2026 s/d 31/12/2026	190.000.000,00
55	Tanah dan Bangunan	Jalan Kusumanegara Nomor 168E Yogyakarta	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2Desaku)	B/00.10.7/8431/B2	01/02/2025 s/d 31/01/2027	18.150.000,00	01/01/2026 s/d 31/01/2026	9.845.753,42
56	Tanah dan Bangunan	Jalan DI Panjaitan Nomor 74 Yogyakarta	Agung Udayana, B.E	13/PERJ/SEKDA/II/2025	01/12/2025 s/d 30/11/2026	7.918.000,00	01/01/2026 s/d 30/11/2026	7.245.512,33
57	Tanah dan Bangunan	Yogyakarta	Agung Udayana, B.E	proses	01/12/2026 s/d 30/11/2027	7.918.000,00	01/01/2026 s/d 30/11/2026	15.163.512,33
58	Tanah dan Bangunan	Gunung Sempu, Taman Tirta, Kasihan, Bantul	Komunitas Gayam 16	proses	07/01/2026 s/d 06/01/2027	7.500.000,00	01/01/2026 s/d 07/01/2026	7.623.287,67
59	Tanah dan Bangunan	Jl Bima 25 B Jurugentong Banguntapan Bantul	Ajie Mardana ST	B/00.10.7/6445/B2	01/10/2025 s/d 30/07/2026	3.000.000,00	01/01/2026 s/d 30/07/2026	2.089.108,91
60	Tanah dan Bangunan	Jl Sriti No.20 B Demangan Baru Depok Sleman	Dra. Sulistyarningsih	B/00.10.7/1679/B2	01/12/2026 s/d 30/11/2027	13.440.000,00	01/01/2026 s/d 30/11/2026	2.172.493,15
							PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	6.623.413.817,86

Tabel III.72
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka KPPD Bantul

No	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025	
					Periode	Nilai
1	Pimpinan PT Bank BPD DIY Cabang Bantul	900/08376	01/01/2022 s/d 31/12/2026	17.500.000,00	01/01/2026 s/d 31/12/2026	3.498.083,24
					PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	3.498.083,24



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.73

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka KPPD Kulon Progo

No	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025	
					Periode	Nilai
1	PT BRI (PERSERO) Tbk Cabang Wates (ATM)	B/00.1.4.1/1055/B2.4	01/08/2025 s/d 31/07/2026	3.000.000,00	01/01/2026 s/d 31/07/2026	1.742.465,75
2	Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy)	B/00.1.4.1/1082/B2.4	01/08/2025 s/d 31/07/2026	5.040.000,00	01/01/2026 s/d 31/07/2026	2.927.342,47
3	Koperasi Binangun Sejati (Bagiyo Prayitno/Parkir)	B/00.1.4.1/1073/B2.4	01/08/2025 s/d 31/07/2026	16.800.000,00	01/01/2026 s/d 31/07/2026	9.757.808,22
4	Painem (Kantin)	B/00.1.4.1/1072/B2.4	01/08/2025 s/d 31/07/2026	5.040.000,00	01/01/2026 s/d 31/07/2026	2.927.342,47
5	PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (Sewa Kantor Kas BPD)	934/6558	01/01/2022 s/d 31/12/2026	60.000.000,00	01/01/2026 s/d 31/12/2026	11.993.428,26
6	PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (ATM BPD)	934/6558	01/01/2022 s/d 31/12/2026	15.000.000,00	01/01/2026 s/d 31/12/2026	2.998.357,06
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA						32.346.744,23

2.1.06. Utang Belanja Rp 238.404.042,00 Rp 43.349.261.333,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp 238.404.042,00 merupakan beban BPKA atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2025 tetapi belum dibayarkan sebesar Rp 215.594.253,00 serta utang transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 22.809.789,00.

2.1.06.02 Utang Belanja Barang dan Jasa Rp 215.594.253,00 Rp 201.256.813,00

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp 215.594.253,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 14.337.440,00 atau 7,12% dibandingkan dengan Utang Belanja Barang dan Jasa BPKA Tahun 2024 sebesar Rp 201.256.813,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.74

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per Unit Kerja

No.	UTANG BELANJA	BPKA (Induk)	KPPD Kota	KPPD Bantul	KPPD KP	KPPD GK	KPPD SLEMAN	JUMLAH (Rp)
1	Tagihan Telepon	980.251,00	76.301,00	69.542,00	45.124,00	101.681,00	141.702,00	1.414.601,00
2	Tagihan Listrik	30.085.318,00	20.049.026,00	2.172.090,00	26.089.846,00	14.159.910,00	50.224.719,00	192.780.909,00
3	Tagihan Air	1.290.700,00	-	72.300,00	1.176.400,00	2.086.270,00	218.500,00	4.844.170,00
4	Kawat/Faksimili/Internet/TV	-	5.667.194,00	-	-	10.424.079,00	313.300,00	16.404.573,00
5	Tagihan Sampah	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
JUMLAH (Rp)		32.356.269,00	25.942.521,00	52.313.932,00	27.311.370,00	26.771.940,00	50.898.221,00	215.594.253,00

2.1.06.03 Utang Belanja Bagi Hasil Rp 22.809.789,00 Rp 43.148.004.520,00

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025 sebesar Rp 22.809.789,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 20.267.491,00 dan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebesar Rp 2.542.298,00. Utang Belanja Bagi Hasil memiliki rincian sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.75

Rincian Utang Belanja Bagi Hasil

No.	URAIAN	2025
1	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Bantul	2.376.986,00
2	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Gunungkidul	1.905.515,00
3	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Kulon Progo	9.266.681,00
4	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Sleman	6.718.309,00
5	Utang Belanja Bagi Hasil Kota Yogyakarta	2.542.298,00
JUMLAH (Rp)		22.809.789,00

3.1.7. Ekuitas

Rp 4.034.761.470.834,36

Rp 3.694.315.916.388,01

Saldo Ekuitas BPKA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.034.761.470.834,36 merupakan kekayaan bersih BPKA yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban BPKA pada tanggal 31 Desember 2025. Saldo Ekuitas BPKA per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 340.445.554.446,35 atau 9,22% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 3.694.315.916.388,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.76

Mutasi Ekuitas

No	Uraian	Jumlah
1	Ekuitas Awal	3.694.315.916.388,01
2	Surplus/Defisit – LO	4.519.811.370.684,71
3	RK PPKD	(3.671.507.896.378,46)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(507.857.919.859,90)
JUMLAH (Rp)		4.034.761.470.834,36



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

	2025	2024 (audited)
3.1.8. Pendapatan Daerah-LO	<u>Rp 5.462.376.081.271,48</u>	<u>Rp 5.851.599.725.109,22</u>

Pendapatan Daerah-LO BPKA Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 5.462.376.081.271,48 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp 1.881.277.418.936,48; Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp 3.022.127.853.161,00; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp 558.970.809.174,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.8.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	<u>Rp 1.881.277.418.936,48</u>	<u>Rp 2.333.407.938.729,22</u>
---	---------------------------------------	---------------------------------------

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO BPKA Tahun 2025 sebesar Rp 1.881.277.418.936,48 meliputi Pajak Daerah-LO sebesar Rp 1.541.673.476.325,25; Retribusi Daerah-LO sebesar Rp 1.051.639.816,21; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp 274.150.105.850,78; dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp 64.402.196.944,24 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.8.1.1. Pajak Daerah-LO	<u>Rp 1.541.673.476.325,25</u>	<u>Rp 2.157.532.293.945,00</u>
-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Pajak Daerah BPKA Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 1.541.673.476.325,25. Pajak Daerah-LO mengalami penurunan sebesar (Rp 615.858.817.619,75) atau (28,54%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 2.157.532.293.945,00. Pajak Daerah-LO BPKA terdiri dari pendapatan pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dikurangi dengan piutang pajak yang sudah dibayarkan dengan rincian:

Tabel III.77
Rincian Pajak Daerah-LO

URAIAN	2025	2024
PAJAK DAERAH-LO		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	666.057.670.000,00	1.041.662.985.900,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	201.880.407.600,00	453.957.069.400,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	377.603.830.093,00	372.113.724.291,00
Pajak Air Permukaan-LO	922.269.636,00	806.104.996,00
Pajak Rokok-LO	294.042.213.023,00	288.962.709.258,00
Pajak Alat Berat-LO	58.256.600,00	29.700.100,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	1.108.829.373,25	-
JUMLAH (Rp)	1.541.673.476.325,25	2.157.532.293.945,00

Tidak terdapat penambahan maupun pembayaran piutang pajak selama Tahun Anggaran 2025 sehingga Pajak Daerah-LO mencerminkan nilai pendapatan pajak yang benar-benar disetorkan ke RKUD selama tahun berjalan.

3.1.8.1.2. Retribusi Daerah-LO	<u>Rp 1.051.639.816,21</u>	<u>Rp 1.068.701.049,96</u>
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Pendapatan Retribusi Daerah-LO BPKA pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.051.639.816,21. Retribusi Daerah-LO BPKA pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp 17.071.233,75) atau (1,60%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 1.068.701.049,96. Retribusi Daerah-LO BPKA pada Tahun 2025 terdiri dari Retribusi Jasa Usaha-LRA yang telah diterima secara kas oleh Bendahara Penerimaan pada akhir tahun 2025 dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp 1.062.539.730,00 dikurangi dengan pembayaran Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 sebesar (Rp 54.354.958,90) dan ditambah dengan pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp 6.659.258.645,33 dengan rincian sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.78
Rincian Retribusi Daerah-LO

URAIAN	2025	2024
RETRIBUSI DAERAH-LO		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	54.354.958,90	38.384.122,96
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	115.175.172,53	150.740.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	882.109.684,78	879.576.927,00
JUMLAH (Rp)	1.051.639.816,21	1.068.701.049,96

3.1.8.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO **Rp 274.150.105.850,78** **Rp 66.372.413.217,67**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO BPKA Tahun 2025 adalah sebesar Rp 274.150.105.850,78. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp 207.777.692.633,11 atau 313,05% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 66.372.413.217,67. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO BPKA Tahun 2025 merupakan laba/rugi BUMD Tahun 2025 bagian Pemda DIY yang menambah investasi permanen yang diterima secara kas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.79
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2025
1	PT. Taru Martani (Metode Ekuitas)	10.446.695.763,95
2	PT. BPD DIY (Metode Ekuitas)	245.834.754.887,81
3	PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)	5.667.946.447,57
4	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY (Metode Ekuitas)	(2.693.431.806,09)
5	PT. Asuransi Bangun Askrida (Metode Harga Perolehan)	-
6	Badan Usaha Kredit Pedesaan (Metode Ekuitas)	14.894.140.557,54
	Jumlah (Rp)	274.150.105.850,78

Saldo akhir Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada tahun 2025 merepresentasikan kinerja investasi pemerintah daerah pada BUMD yang dicatat dengan metode ekuitas dengan perhitungan selisih sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Rp 274.150.105.850,78
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	<u>Rp 127.241.046.476,91</u>
Selisih	Rp 146.909.059.373,87

Perhitungan saldo akhir investasi dimulai dari nilai pengakuan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp 127.241.046.476,91. Nilai tersebut kemudian disesuaikan dengan Pengurangan Penyertaan Modal Metode Ekuitas sebesar Rp 127.241.046.476,91 yang menunjukkan bahwa seluruh nilai penyertaan modal awal telah dikurangi karena adanya dividen yang telah dibagikan. Selanjutnya, terdapat penambahan dari Bagian Laba Pemda DIY atas LK BUMD 2025 sebesar Rp 198.692.466.429,52; Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD 2025 sebesar Rp 61.109.504.862,90; investasi bernilai negatif dari BUKP sebesar Rp 14.189.956.079,15; dan koreksi BPK atas deviden BUKP yang belum disetor ke Pemda DIY sebesar Rp 158.178.479,20 sehingga menghasilkan saldo akhir investasi sebesar Rp 274.150.105.850,78.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආකෘති පාලන කළමනාකරණ සහ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.8.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO **Rp 64.402.196.944,24** **Rp 108.434.530.516,59**

Lain-Lain PAD yang Sah-LO BPKA Tahun 2025 adalah sebesar Rp 64.402.196.944,24. Lain-Lain PAD yang Sah BPKA Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp 44.032.333.572,35) atau (40,61%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 108.434.530.516,59. Lain-Lain PAD yang Sah-LO BPKA Tahun 2025 terdiri dari Lain-lain PAD yang Sah-LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.80
Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO

URAIAN	2025	2024
LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LO		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	24.865.076,52
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	8.689.617.345,20	15.987.993.523,15
Jasa Giro-LO	4.875.380.592,00	7.953.419.673,00
Pendapatan Bunga-LO	17.267.339.787,00	16.371.213.210,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	25.900,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	597.284.704,39	735.407.168,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	28.938.474.579,00	61.431.097.950,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	43.185.707,00	36.388.533,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	348.191.800,00	-
Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.618.243.529,65	5.894.145.382,92
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	24.453.000,00	-
TOTAL (Rp)	64.402.196.944,24	108.434.530.516,59

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Rp 0,00
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA Rp 2.719.973.024,00
- Selisih Rp 2.719.973.024,00

Penyajian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan menunjukkan saldo sebesar Rp 2.719.973.024,00 pada Laporan Realisasi Anggaran, sementara pada Laporan Operasional saldo akun tersebut adalah nihil (Rp 0,00). Hal ini terjadi karena seluruh realisasi penjualan aset pada periode berjalan telah diklasifikasikan ke dalam pos Surplus/Defisit Non-Operasional pada Laporan Operasional. Selisih tersebut dijelaskan sebagai kombinasi dari perolehan keuntungan atas penjualan aset (Surplus) senilai Rp 1.826.509.524,00 serta kerugian atas penjualan aset (Defisit) senilai Rp 893.463.500,00. Dengan demikian, total nilai penjualan di LRA merupakan akumulasi dari komponen-komponen surplus dan defisit tersebut.

- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Rp 8.689.617.345,20
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA Rp 11.741.459.111,00
- Selisih Rp 3.051.841.765,80

Terdapat selisih sebesar Rp 3.051.841.765,80 antara saldo Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Laporan Operasional sebesar Rp 8.689.617.345,20 dengan LRA sebesar Rp 11.741.459.111,00. Perbedaan tersebut disebabkan oleh penyesuaian basis akrual atas masa manfaat pendapatan, yang mencakup penambahan dari Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.542.162.006,84 karena pendapatan tahun lalu telah menjadi hak tahun berjalan serta pengurangan atas Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6.594.003.772,64 karena penerimaan kas tahun berjalan menjadi hak tahun mendatang. Selisih ini menunjukkan bahwa sebagian penerimaan kas yang dicatat pada LRA tahun ini secara akuntansi akrual belum dapat diakui sepenuhnya sebagai pendapatan LO periode berjalan karena melintasi periode masa manfaat.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආයතන විපක්ෂක සහකාර මණ්ඩලය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- Jasa Giro-LO Rp 4.875.380.592,00
Jasa Giro-LRA Rp 4.875.380.592,00
Selisih Rp 0,00
Tidak terdapat selisih antara Jasa Giro dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga pendapatan seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- Pendapatan Bunga-LO Rp 17.267.339.787,00
Pendapatan Bunga-LRA Rp 17.267.339.787,00
Selisih Rp 0,00
Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Bunga dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga pendapatan seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Rp 25.900,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LRA Rp 25.900,00
Selisih Rp 0,00
Tidak terdapat selisih antara Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga pendapatan seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Rp 597.284.704,39
Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA Rp 597.284.704,39
Selisih Rp 0,00
Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga pendapatan seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Rp 28.938.474.579,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA Rp 28.938.474.579,00
Selisih Rp 0,00
Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga pendapatan seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Rp 43.185.707,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LRA Rp 43.185.707,00
Selisih Rp 0,00
Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Denda Retribusi Daerah dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga pendapatan seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- | | |
|--|--------------------------|
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO | Rp 348.191.800,00 |
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LRA | <u>Rp 348.191.800,00</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga pendapatan seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Pendapatan dari Pengembalian-LO | Rp 3.618.243.529,65 |
| Pendapatan dari Pengembalian-LRA | <u>Rp 3.618.243.529,65</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan dari Pengembalian dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga pendapatan seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- | | |
|--|-------------------------|
| Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO | Rp 24.453.000,00 |
| Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LRA | <u>Rp 24.453.000,00</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga pendapatan seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3.1.8.2. Pendapatan Transfer-LO Rp 3.022.127.853.161,00 Rp 3.508.682.988.702,00

Pendapatan Transfer-LO BPKA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.022.127.853.161,00 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak BPKA DIY yang telah diakui sebagai penambah Ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2025 dan tidak perlu dibayar kembali kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.81
Rincian Pendapatan Transfer-LO

URAIAN	2025	2024
PENDAPATAN TRANSFER-LO	3.022.127.853.161,00	3.508.682.988.702,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO	3.021.146.926.530,00	3.507.699.183.472,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	2.036.560.290.164,00	2.099.451.814.040,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	104.287.042.600,00	87.562.321.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.345.942.438.538,00	1.337.180.068.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	49.005.271.853,00	156.735.319.268,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	537.325.537.173,00	517.974.105.772,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	984.586.636.366,00	1.408.247.369.432,00
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO	976.134.243.366,00	1.396.157.452.432,00
Insentif Fiskal-LO	8.452.393.000,00	12.089.917.000,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	980.926.631,00	983.805.230,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota-LO	980.926.631,00	983.805.230,00

Realisasi Pendapatan Transfer-LO pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 3.022.127.853.161,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 486.555.135.541,00) atau (13,87%) dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 3.508.682.988.702,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Pendapatan Transfer-LO memiliki perbedaan nilai dengan Pendapatan Transfer-LRA dengan selisih yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer-LO	Rp 3.022.127.853.161,00
Pendapatan Transfer-LRA	<u>Rp 3.022.299.662.161,00</u>
Selisih	Rp 171.809.000,00

Terdapat selisih sebesar Rp171.809.000,00 antara realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran yang disebabkan oleh adanya realisasi transfer non tunai melalui skema *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun Anggaran 2024 yang baru masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Tahun Anggaran 2025. Secara akrual, nilai tersebut tidak lagi diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional tahun ini karena telah dicatat sebagai pendapatan pada periode sebelumnya saat hak atas dana tersebut terbentuk. Sebaliknya, pada Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas, nilai tersebut tetap dilaporkan sebagai pendapatan karena arus kasnya baru secara nyata diterima di kas daerah pada tahun anggaran berjalan. Hal ini mencerminkan perbedaan waktu pengakuan antara pendapatan secara akrual dengan realisasi penerimaan secara kas.

3.1.8.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Rp 558.970.809.174,00 Rp 9.508.797.678,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 558.970.809.174,00 merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang sudah menjadi hak BPKA DIY yang telah diakui sebagai penambah Ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2025 dan tidak perlu dibayar kembali kepada pihak lain berupa pengakuan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.82
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

URAIAN	2025	2024
PENDAPATAN HIBAH-LO		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	540.262.631.174,00	1.423.354.678,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	540.262.631.174,00	1.423.354.678,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	51.426.048,00	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	51.426.048,00	-
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	11.276.152.952,00	8.084.153.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	7.303.299.000,00	8.084.153.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	77.300.000,00	1.290.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	77.300.000,00	1.290.000,00
Jumlah (Rp)	558.970.809.174,00	9.508.797.678,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO memiliki perbedaan nilai dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dengan selisih yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Rp 558.970.809.174,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	<u>Rp 7.303.299.000,00</u>
Selisih	Rp 551.667.510.174,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආකෘතිමය වාර්තා සහ වාර්තා කළමනාකරු

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.9.1. Beban Operasi Rp 88.471.969.736,38 Rp 92.795.883.760,33

Beban Operasi BPKA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 88.471.969.736,38 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 64.216.860.816,00; Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 24.240.997.820,38; dan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp 14.111.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.9.1.1. Beban Pegawai Rp 64.216.860.816,00 Rp 80.614.113.785,00

Beban Pegawai BPKA Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 64.216.860.816,00. Beban Pegawai BPKA Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp 16.397.252.969,00) atau (20,34%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 80.614.113.785,00. Beban Pegawai BPKA Tahun Anggaran 2025 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.83
Rincian Beban Pegawai**

URAIAN	2025	2024
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	18.134.306.282,00	18.438.622.450,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	46.082.554.534,00	9.481.431.335,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	52.694.060.000,00
Jumlah (Rp)	64.216.860.816,00	80.614.113.785,00

3.1.9.1.2. Beban Barang dan Jasa Rp 24.240.997.820,38 Rp 11.167.176.507,50

Beban Barang dan Jasa BPKA Tahun 2025 adalah sebesar Rp 24.240.997.820,38. Beban Barang dan Jasa BPKA Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 13.073.821.312,88 atau 117,07% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 11.167.176.507,50. Beban Barang dan Jasa BPKA Tahun 2025 merupakan kenaikan manfaat ekonomis dalam periode tahun 2025 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel III.84
Rincian Beban Barang dan Jasa**

URAIAN	2025	2024
BEBAN BARANG DAN JASA		
Beban Barang		
Beban Barang Pakai Habis	4.994.639.916,98	4.442.894.984,90
Jumlah (Rp)	4.994.639.916,98	4.442.894.984,90
Beban Jasa		
Beban Jasa Kantor	12.660.178.862,00	12.143.111.287,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	489.704.050,08	570.019.728,71
Beban Sewa Tanah	11.862.900,00	11.298.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	498.186.578,00	329.103.837,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	209.572.652,32	235.947.930,18
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	89.700.000,00	107.250.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	2025	2024
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	99.245.100,00	99.300.600,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.639.964.206,00	1.731.503.792,00
Jumlah (Rp)	15.698.414.348,40	15.227.535.174,89
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Tanah	99.650.000,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.193.796.547,00	2.331.869.463,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	812.713.312,00	(11.635.859.333,29)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.786.000,00	29.607.600,00
Jumlah (Rp)	3.145.945.859,00	(9.274.382.270,29)
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah	395.697.696,00	769.428.618,00
Jumlah (Rp)	395.697.696,00	769.428.618,00
Jumlah (Rp) Beban Barang dan Jasa	24.240.997.820,38	11.167.176.507,50

• **Beban Barang Pakai Habis**

Beban Barang Pakai Habis merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, berupa pengeluaran untuk barang persediaan yang habis digunakan dalam satu tahun anggaran. Beban Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 551.744.932,08 atau 12,42% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 4.442.894.984,90. Terdapat perbedaan saldo Beban Barang Pakai Habis di Laporan Operasional dibandingkan dengan Belanja Barang Pakai Habis di Laporan Realisasi Anggaran dengan perhitungan sebagai berikut:

Beban Barang Pakai Habis (LO)	Rp	4.994.639.916,98
Belanja Barang Pakai Habis (LRA)	Rp	<u>5.227.560.820,00</u>
Selisih	Rp	232.920.903,02

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tercatat sebesar Rp 5.227.560.820,00. Dari jumlah tersebut, dilakukan reklasifikasi sebesar (Rp 4.470.186.598,00) ke dalam akun Persediaan di Neraca dikarenakan BPKA DIY menggunakan Metode Aset dalam pencatatan persediaan, sehingga setiap barang pakai habis yang membentuk barang persediaan langsung diakui di Neraca dan tidak dicatat sebagai beban di Laporan Operasional. Selain itu, terdapat penurunan manfaat ekonomi persediaan atau pembebanan persediaan untuk Persediaan yang telah dikeluarkan sebesar Rp 4.148.431.811,26 yang diakui sebagai Beban Barang Pakai Habis di Laporan Operasional serta penghapusan persediaan sebesar Rp 88.833.892,72 yang menambah saldo akhir Beban Barang Pakai Habis di Laporan Operasional.

• **Beban Jasa Kantor**

Beban Jasa Kantor Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 12.660.178.862,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 517.067.575,00 atau 4,26% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 12.143.111.287,00. Terdapat perbedaan saldo Beban Jasa Kantor di Laporan Operasional dibandingkan dengan Belanja Jasa Kantor di Laporan Realisasi Anggaran dengan perhitungan sebagai berikut:

Beban Jasa Kantor (LO)	Rp	12.660.178.862,00
Belanja Jasa Kantor (LRA)	Rp	<u>12.734.925.422,00</u>
Selisih	Rp	74.746.560,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Jasa Kantor pada Laporan Realisasi Anggaran tercatat sebesar Rp 12.734.925.422,00. Dari jumlah tersebut, terdapat pembayaran Utang Belanja Jasa Tahun 2024 sebesar (Rp 201.256.813,00) yang telah diakui sebagai Beban Jasa Kantor di tahun 2024 sehingga tidak lagi menjadi beban di tahun 2025. Selain itu, terdapat pengakuan Utang Belanja Jasa Tahun 2025 sebesar Rp 215.594.253,00 yang dicatat sebagai Beban Jasa Kantor pada tahun berjalan. Terdapat reklasifikasi Belanja Barang Pakai Habis yang membentuk barang Persediaan ke Beban Jasa Kantor sebesar (Rp 6.924.000,00) dan reklasifikasi Belanja Modal ke Beban Jasa Kantor sebesar (Rp 82.160.000,00).

- **Beban luran Jaminan/Asuransi**

Beban luran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 489.704.050,08 mengalami penurunan sebesar (Rp 80.315.678,63) atau (14,09%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 570.019.728,71. Terdapat perbedaan saldo Beban luran Jaminan/Asuransi di Laporan Operasional dibandingkan dengan Belanja luran Jaminan/Asuransi di LRA dengan perhitungan sebagai berikut:

Beban luran Jaminan/Asuransi (LO)	Rp	489.704.050,08
Belanja luran Jaminan/Asuransi (LRA)	Rp	<u>490.025.509,00</u>
Selisih	Rp	321.458,92

Beban luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp 489.704.050,08 didapat dari pembayaran asuransi Barang Milik Daerah Polis Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi Gedung Kantor Milik Pemerintah DIY sebesar Rp 289.755.509,00 dan Pembayaran Asuransi Barang Milik Daerah Polis Asuransi Kendaraan Roda 4 Keatas Milik Pemerintah DIY sebesar Rp 200.270.000,00 kemudian ditambah dengan pembayaran Beban Dibayar Dimuka tahun 2024 sebesar Rp 270.870.740,58 serta dikurangi pengakuan Beban Dibayar Dimuka tahun 2025 sebesar (Rp 271.192.199,50) untuk asuransi gempa bumi, kebakaran, dan kendaraan milik Pemda DIY.

- **Beban Sewa Tanah**

Beban Sewa Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 11.862.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 564.900,00 atau 5,00% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 11.298.000,00.

Beban Sewa Tanah (LO)	Rp	11.862.900,00
Belanja Sewa Tanah (LRA)	Rp	<u>11.862.900,00</u>
Selisih	Rp	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Sewa Tanah dalam Laporan Operasional dan Belanja Sewa Tanah dalam Laporan Realisasi Anggaran sehingga belanja seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- **Beban Sewa Peralatan dan Mesin**

Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 498.186.578,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 169.082.741,00 atau 51,38% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 329.103.837,00.

Beban Sewa Peralatan dan Mesin (LO)	Rp	498.186.578,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin (LRA)	Rp	<u>498.186.578,00</u>
Selisih	Rp	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Sewa Peralatan dan Mesin dalam Laporan Operasional dan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dalam Laporan Realisasi Anggaran sehingga belanja seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආයතන විභාගනු ලබන මුදල් ආයතන කළමනාකරු

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Beban Sewa Gedung dan Bangunan**

Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 209.572.652,32 mengalami penurunan sebesar (Rp 26.375.277,86) atau (11,18%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 235.947.930,18. Terdapat perbedaan saldo Beban Sewa Gedung dan Bangunan di Laporan Operasional dibandingkan dengan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan di Laporan Realisasi Anggaran dengan perhitungan sebagai berikut:

Beban Sewa Gedung dan Bangunan (LO)	Rp	209.572.652,32
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (LRA)	<u>Rp</u>	<u>259.400.000,00</u>
Selisih	Rp	49.827.347,68

Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp 209.572.652,32 didapat dari Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 259.400.000,00 ditambah pembayaran Beban Dibayar Dimuka KPPD Kulon Progo dan KPPD Bantul tahun 2024 sebesar Rp 26.119.556,16 serta dikurangi pengakuan Beban Dibayar Dimuka KPPD Kulon Progo dan KPPD Bantul tahun berjalan sebesar (Rp 75.946.903,84) berupa sewa bangunan Gedung untuk Samsat Desa Palihan, Samsat Desa Argomulyo, dan Samsat Desa Sidomulyo.

• **Beban Sewa Aset Tetap Lainnya**

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 89.700.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 17.550.000,00) atau (16,36%) dibandingkan dengan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp 107.250.000,00.

Beban Sewa Gedung dan Bangunan (LO)	Rp	89.700.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (LRA)	<u>Rp</u>	<u>89.700.000,00</u>
Selisih	Rp	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Sewa Aset Tetap Lainnya dalam Laporan Operasional dan Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya dalam Laporan Realisasi Anggaran sehingga belanja seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

• **Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 99.245.100,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 55.500,00) atau (0,06%) dibandingkan dengan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2024 sebesar Rp 99.300.600,00.

Beban Sewa Gedung dan Bangunan (LO)	Rp	99.245.100,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (LRA)	<u>Rp</u>	<u>99.245.100,00</u>
Selisih	Rp	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Jasa Konsultansi Konstruksi dalam Laporan Operasional dan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dalam Laporan Realisasi Anggaran sehingga belanja seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘතිමය පාලන සහ සේවා කොට්ඨාසය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi**

Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.639.964.206,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 91.539.586,00) atau (5,29%) dibandingkan dengan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2024 sebesar Rp 1.731.503.792,00.

Beban Sewa Gedung dan Bangunan (LO)	Rp	1.639.964.206,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (LRA)	<u>Rp</u>	<u>1.639.964.206,00</u>
Selisih	Rp	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi dalam Laporan Operasional dan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dalam Laporan Realisasi Anggaran sehingga belanja seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

• **Beban Pemeliharaan Tanah**

Beban Pemeliharaan Tanah sebesar Rp 99.650.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 99.650.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 0,00.

Beban Pemeliharaan Tanah (LO)	Rp	99.650.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah (LRA)	<u>Rp</u>	<u>99.650.000,00</u>
Selisih	Rp	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Pemeliharaan Tanah dalam Laporan Operasional dan Belanja Pemeliharaan Tanah dalam Laporan Realisasi Anggaran sehingga belanja seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

• **Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.193.796.547,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 138.072.916,00) atau (5,92%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 2.331.869.463,00. Terdapat perbedaan saldo Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Laporan Operasional dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Laporan Realisasi Anggaran dengan perhitungan sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (LO)	Rp	2.193.796.547,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (LRA)	<u>Rp</u>	<u>2.265.599.292,00</u>
Selisih	Rp	71.802.745,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (LRA) untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.265.599.292,00, sedangkan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (LO) tercatat sebesar Rp 2.193.796.547,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 71.802.745,00 yang disebabkan oleh adanya kebijakan akuntansi terkait kapitalisasi Aset dan Persediaan. Selisih tersebut berasal dari kegiatan pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi untuk Aset sebesar Rp 4.314.000,00 dan pencatatan belanja pemeliharaan ke barang Persediaan sebesar Rp 67.488.745,00. Oleh karena itu, pengeluaran tersebut tidak diakui sebagai beban pada periode berjalan, melainkan disajikan sebagai Aset pada Neraca per 31 Desember 2025.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘති පිළිගැනීමේ කාර්යාලය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 812.713.312,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 12.448.572.645,29 atau 106,98% dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar (Rp 11.635.859.333,29).

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (LO)	Rp	812.713.312,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (LRA)	Rp	<u>812.713.312,00</u>
Selisih	Rp	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dalam Laporan Operasional dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dalam Laporan Realisasi Anggaran sehingga belanja seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

• **Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah**

Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp 395.697.696,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 373.730.922,00) atau (48,57%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 769.428.618,00.

Beban Pemeliharaan Tanah (LO)	Rp	99.650.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah (LRA)	Rp	<u>99.650.000,00</u>
Selisih	Rp	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Laporan Operasional dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran sehingga belanja seluruhnya diakui secara kas, yaitu pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3.1.9.1.3. Beban Penyisihan Piutang Rp 14.111.100,00 Rp 1.014.593.467,83

Beban Penyisihan Piutang BPKA Tahun 2025 sebesar Rp 14.111.100,00 merupakan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp 1.046.250,00 dan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 13.064.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.85
Rincian Beban Penyisihan Piutang

URAIAN	2025	2024
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG		
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.046.250,00	609.750,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	1.046.250,00	609.750,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	17.589.885,83
Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	17.589.885,83
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	13.064.850,00	996.393.832,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	564.850,00	293.200,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	12.500.000,00	996.100.632,00
Jumlah (Rp)	14.111.100,00	1.014.593.467,83



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Beban Penyisihan Piutang BPKA Tahun 2025 sebesar Rp 14.111.100,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 1.000.482.367,83) atau (98,61%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 1.014.593.467,83. Beban Penyisihan Piutang di Tahun Anggaran 2025 merupakan dampak dari pelaksanaan kebijakan Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada KPPD Bantul dan KPPD Sleman sesuai dengan amanat SK Gubernur No. 122 Tahun 2025 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang muncul karena adanya selisih antara nilai piutang yang dihapuskan dengan saldo penyisihan yang telah dibentuk sebelumnya. Beban Penyisihan Piutang yang muncul akibat adanya penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah sebesar Rp 1.611.100,00. Selain itu, Beban Penyisihan Piutang juga timbul akibat adanya Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Masyarakat untuk pembayaran Peningkatan Hubungan Penyangga (LHP) tahun 2012, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUPE) Pemerintah DIY sebesar Rp 12.500.000,00.

3.1.9.2. Beban Penyusutan Rp 17.887.396.715,39 Rp 13.214.077.853,96

Beban Penyusutan BPKA sebesar Rp 17.887.396.715,39 merupakan pengakuan atas pemanfaatan aset tetap dan aset lainnya yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025. Jumlah ini menunjukkan nilai pemakaian kapasitas atau manfaat ekonomi aset tetap yang mengalami peningkatan sebesar Rp 4.673.318.861,43 atau 35,37% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 13.214.077.853,96. Peningkatan nilai beban penyusutan dari tahun sebelumnya menunjukkan adanya pertumbuhan nilai aset tetap yang dikelola yang berpengaruh terhadap bertambahnya nilai akumulasi penyusutan sebagai pengurang nilai aset di Neraca.

3.1.9.4. Beban Transfer Rp 820.638.737.232,34 Rp 1.472.896.541.016,82

Beban Transfer BPKA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 820.638.737.232,34 terdiri atas Beban Bagi Hasil sebesar Rp 498.146.936.328,00 dan Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp 322.491.800.904,34. Beban Transfer mengalami penurunan sebesar (Rp 652.257.803.784,48) atau (44,28%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 1.472.896.541.016,82 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.86
Rincian Beban Transfer**

URAIAN	2025	2024
BEBAN TRANSFER		
Beban Bagi Hasil	498.146.936.328,00	911.842.572.564,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	422.115.317.202,00	755.824.138.849,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	76.031.619.126,00	156.018.433.715,00
Beban Bantuan Keuangan	322.491.800.904,34	561.053.968.452,82
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	-
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	180.781.170.273,84	428.964.512.711,77
Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	138.710.630.630,50	132.089.455.741,05
Jumlah (Rp)	820.638.737.232,34	1.472.896.541.016,82

Terdapat perbedaan saldo antara Beban Transfer di Laporan Operasional dengan Belanja Transfer di Laporan Realisasi Anggaran dengan perhitungan sebagai berikut:

Beban Transfer (LO)	Rp 820.638.737.232,34
Belanja Transfer (LRA)	<u>Rp 863.763.931.963,34</u>
Selisih	Rp 43.125.194.731,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tercatat sebesar Rp 863.763.931.963,34, sedangkan Beban Transfer pada Laporan Operasional (LO) adalah senilai Rp 820.638.737.232,34, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 43.125.194.731,00. Perbedaan ini disebabkan oleh penyesuaian atas pengakuan transaksi akrual terkait pembayaran Utang Belanja Bagi Hasil tahun sebelumnya sebesar Rp 43.148.004.520,00 yang secara kas memengaruhi LRA namun tidak diakui sebagai beban tahun berjalan pada Laporan Operasional. Sebaliknya, terdapat pengakuan beban baru yang belum dibayarkan berupa Utang Belanja Bagi Hasil senilai Rp 22.809.789,00 yang diakui sebagai beban pada periode berjalan karena kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan bagi hasil telah timbul, meskipun secara teknis belum dilakukan pembayaran kas hingga tanggal pelaporan.

3.1.9.5. Beban Tidak Terduga Rp 3.405.377.000,00 Rp 20.000.000,00

Beban Tak Terduga BPKA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 405.377.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk penanganan darurat bencana sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebesar Rp 1.072.577.000,00 dan bantuan biaya jatah hidup korban banjir Sumatera sebesar Rp 2.332.800.000,00.

3.1.9.6. Defisit Non Operasional-LO Rp 13.766.044.539,86 Rp 10.698.132.412,97

Berdasarkan laporan hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2025, tercatat nilai Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO adalah sebesar Rp 13.766.044.539,86. Saldo ini merupakan hasil penggabungan antara beban penghapusan aset dengan beban defisit atas penjualan Barang Milik Daerah. Secara total, angka ini tetap bernilai positif karena besarnya nilai buku aset yang dihapuskan oleh BPKA, khususnya pada pos penghapusan Aset Lain-Lain mencapai Rp14.881.202.926,66. Munculnya angka minus sebesar (Rp1.115.158.386,80) merupakan akun kontrapos pada pos penjualan, dimana pendapatan dari pelepasan aset digunakan untuk mengompensasi beban penghapusan nilai buku. Dengan adanya realisasi penjualan ini, defisit yang timbul dari penghapusan aset oleh BPKA tidak diakui sebesar nilai bukunya saja, melainkan telah dikurangi dengan nilai ekonomi yang berhasil diperoleh kembali melalui penjualan tersebut. Oleh karena itu, meskipun terdapat unsur pengurang dari hasil penjualan, posisi akhir laporan tetap menunjukkan nilai defisit neto yang secara akurat merepresentasikan beban pelepasan aset pemerintah daerah pada tahun berjalan.

Tabel III.87
Rincian Defisit Non Operasional-LO

URAIAN	2025
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	13.766.044.539,86
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	(1.115.158.386,80)
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	(408.563.500,00)
Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	(557.647.818,50)
Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	(148.947.068,30)
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	14.881.202.926,66
Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	14.881.202.926,66
Jumlah (Rp)	13.766.044.539,86



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘතිමය වශයෙන් පාලනය කළ හැකි වශයෙන්

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.9.7. Surplus/Defisit LO Rp 4.519.811.370.684,71 Rp 4.263.226.984.204,62

Surplus/Defisit LO sebesar Rp 4.519.811.370.684,71 berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp 5.462.376.081.271,48 dikurangi Beban-LO sebesar (Rp 930.403.480.684,11) ditambah dengan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 1.604.814.637,20 dikurangi Defisit Non Operasional-LO sebesar (Rp 13.766.044.539,86). Surplus/Defisit LO BPKA Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 256.584.386.480,09 atau 6,02% dari tahun 2024 sebesar Rp 4.263.226.984.204,62.

3.1.9.8. Laporan Perubahan Ekuitas Rp 4.034.761.470.834,36 Rp 3.694.315.916.388,01

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas BPKA Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.88
Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2025	2024
Ekuitas Awal	3.694.315.916.388,01	3.426.100.449.426,95
Surplus/Defisit LO	4.519.811.370.684,71	4.263.226.984.204,62
RK PPKD	(3.671.507.896.378,46)	(4.042.467.067.852,95)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(507.857.919.859,90)	47.455.550.609,39
Ekuitas Akhir	4.034.761.470.834,36	3.694.315.916.388,01

3.1.9.8.1. Ekuitas Awal Rp 3.694.315.916.388,01 Rp 3.426.100.449.426,95

Ekuitas Awal BPKA Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 268.215.466.961,06 atau 7,83% dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.426.100.449.426,95.

3.1.9.8.2. Surplus/Defisit LO Rp 4.519.811.370.684,71 Rp 4.263.226.984.204,62

Surplus/Defisit LO BPKA Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 256.584.386.480,09 atau 6,02% dari tahun 2024 sebesar Rp 4.263.226.984.204,62.

3.1.9.8.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (Rp 507.857.919.859,90) Rp 47.455.550.609,39

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar BPKA Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp 507.857.919.859,90) merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp 555.313.470.469,29) dikarenakan lebih banyak transaksi yang mengurangi Ekuitas dibandingkan dengan yang menambah Ekuitas.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BPKA

Terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) dimulai dari Dinas Keuangan pada tahun 1974 s/d 1975, selanjutnya menjadi Direktorat Keuangan pada tahun 1975 s/d 1976. Kemudian berubah nama menjadi Biro Keuangan sampai tahun 1984, selanjutnya Biro Keuangan dari tahun 1997 s/d 2001 dan berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dari tahun 2004 s/d 14 Februari 2009, pada saat itu BPKD merupakan penggabungan dari Biro Keuangan, Dispenda dan Bidang Aset Bapekoinda Provinsi DIY. Kemudian namanya berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi DIY sejak 15 Februari tahun 2009 s.d tahun 2018 dan saat ini menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA).

Sejarah terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY adalah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 huruf (a) yang menyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

Struktur Organisasi BPKA menurut Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum
3. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pajak Daerah
 - b. Subbidang Retribusi Daerah
4. Bidang Anggaran Belanja, terdiri atas:
 - a. Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan
 - b. Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian
5. Bidang Pengelola Kas Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan
 - b. Subbidang Pengelola Kas Perekonomian
6. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah
7. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 - a. Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan
 - b. Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian
8. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - b. Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
9. Unit Pelaksana Teknis
10. Kelompok Jabatan Fungsional



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආරක්ෂක වැරදි පාලන කළමනාකරණ සේවක සංවිධානය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Visi BPKA adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset terbaik se-Indonesia dengan misinya adalah sebagai :

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah
2. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD
4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan profesionalisme SDM

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah dan akuntansi
2. Pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan
3. Melaksanakan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang milik daerah

Sedangkan fungsi BPKA adalah:

1. Penyusunan rencana kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
3. Pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain serta pendapatan transfer;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
6. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
8. Pengelolaan barang milik daerah;
9. Pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
11. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
12. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
14. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

BAB V
PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Audited) Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil konsolidasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran dengan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran) dan disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Untuk penyajian persediaan dan aset tetap di Neraca didukung dengan SIM Persediaan dan SIM ASET milik Pemerintah Daerah Provinsi DIY.

Perencanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY


WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc.
NIP.